

**EVALUASI PENERAPAN PERUBAHAN TARIF UMKM TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKMKOTA MAKASSAR  
(STUDI KASUS KPP MAKASSAR BARAT)**

**KARYA TULIS ILMIAH**



Oleh:  
**KARMILA OKTAFIANA**  
105751102616

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN D-III  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2019**

## MOTTO HIDUP

Dipuji tidak terbang, Dicaci Tidak Tumbang,

Malah semakin Kuat Seperti Tumbang.

Hiduplah Sesukamu, karena sesungguhnya kau akan mati.

Bertemanlah dengan siapapun, karena sesungguhnya kau pasti berpisah. Dan berbuatlah sesukamu, karena setiap

perbuatan menemui Balasan. (*Karmila Oktafiana, 2019*)





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI PERPAJAKAN D-III  
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Evaluasi Penerapan Perubahan Tarif UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Makassar"

Nama Mahasiswa : KARMILA OKTAFIANA  
No. Stambuk/NIM : 105751102616  
Prodi : Perpajakan D-III  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan diujikan di hadapan Tim penguji KTI pada Hari Jumat, 2 Agustus 2019 bertempat di Mini Hall Lt. 8 Menara Iqra.

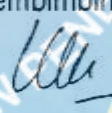
Makassar, 3 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. Akhmad, SE., M.Si  
NIDN : 0031126521

  
Muhaimin, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., CACP  
NIDN : 0930126606

Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Ismail Rasulong, SE, MM  
NBM : 903078

Ketua Prodi Perpajakan  
  
Dr. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA  
NBM : 1165156

## LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Karmila Oktafiana, NIM : 105751102616, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0002/SK-Y/61403/091004/2019 M/1441 H, Tanggal : 02 Agustus 2019 M /1 Dzulhijjah 1441 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Dzulhijjah 1441 H  
02 Agustus 2019 M

### PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.H.Abd.Rahman Rahim SE.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong SE.,MM  
(Dekan Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR. SE., MM  
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji  
1. Dr. H.Andi Rustam SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA  
2. Dr. Agus Salim HR. SE., MM  
3. Ismail Rasulong SE., MM  
4. Abdul Muttalib SE., MM

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong SE., MM**

**NBM : 90307**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karmila Oktafiana

Stambuk : 105751102616

Prodi : Perpajakan

Dengan Judul : "Evaluasi Penerapan Perubahan Tarif UMKM

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota  
Makassar (Studi Kasus KPP Makassar Barat)"

Dengan ini menyatakan bahwa :

*Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan Tim Penguji  
adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak  
dibuat oleh siapapun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia  
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

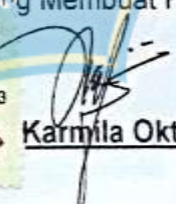
Makassar, 25 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI  
TEMPEL

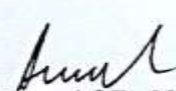
13BB7ADF094492703

6000  
ENAM RIBU RUPIAH


  
Karmila Oktafiana

Diketahui Oleh :

Pembimbing I

  
Dr. Akhmad.SE., M.Si  
NIDN : 0031126521

Pembimbing II

  
Muhaimin.SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., CACP  
NIDN : 0930126606

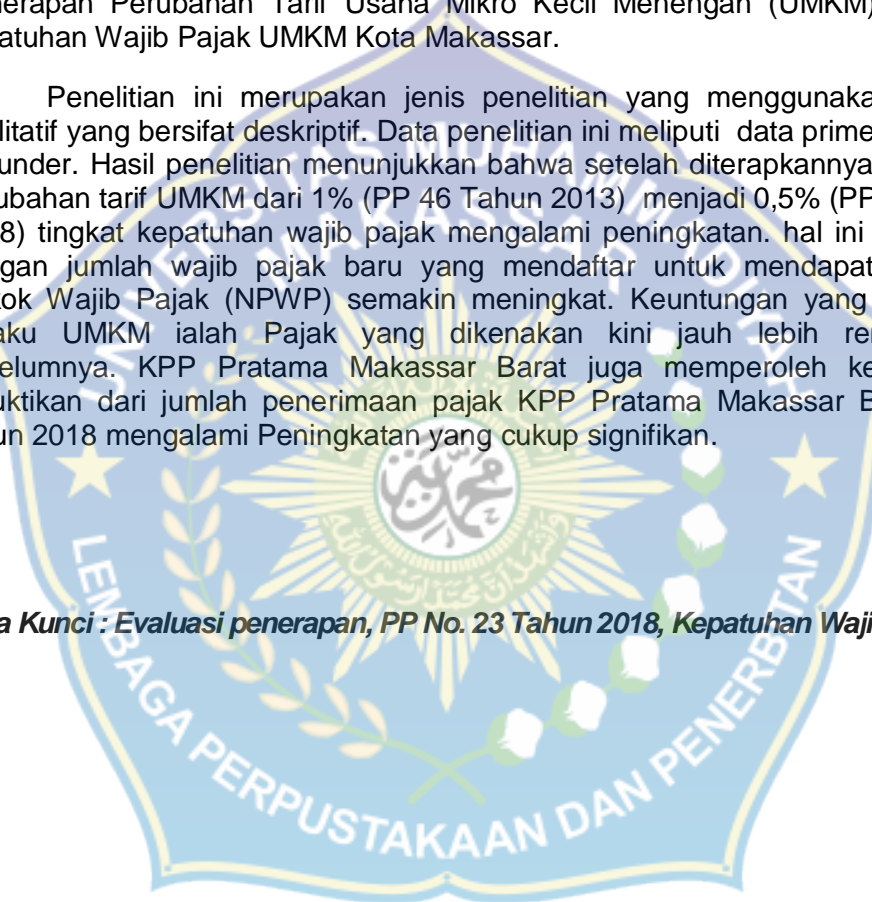
## ABSTRAK

**KARMILA OKTAFIANA, 2019. *Evaluasi Penerapan Perubahan Tarif UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Makassar***, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Akhmad dan Pembimbing II Muhaimin.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai Penerapan Perubahan Tarif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya kebijakan perubahan tarif UMKM dari 1% (PP 46 Tahun 2013) menjadi 0,5% (PP 23 Tahun 2018) tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah wajib pajak baru yang mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) semakin meningkat. Keuntungan yang dirasakan pelaku UMKM ialah Pajak yang dikenakan kini jauh lebih rendah dari sebelumnya. KPP Pratama Makassar Barat juga memperoleh keuntungan, dibuktikan dari jumlah penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2018 mengalami Peningkatan yang cukup signifikan.

**Kata Kunci : *Evaluasi penerapan, PP No. 23 Tahun 2018, Kepatuhan Wajib Pajak***



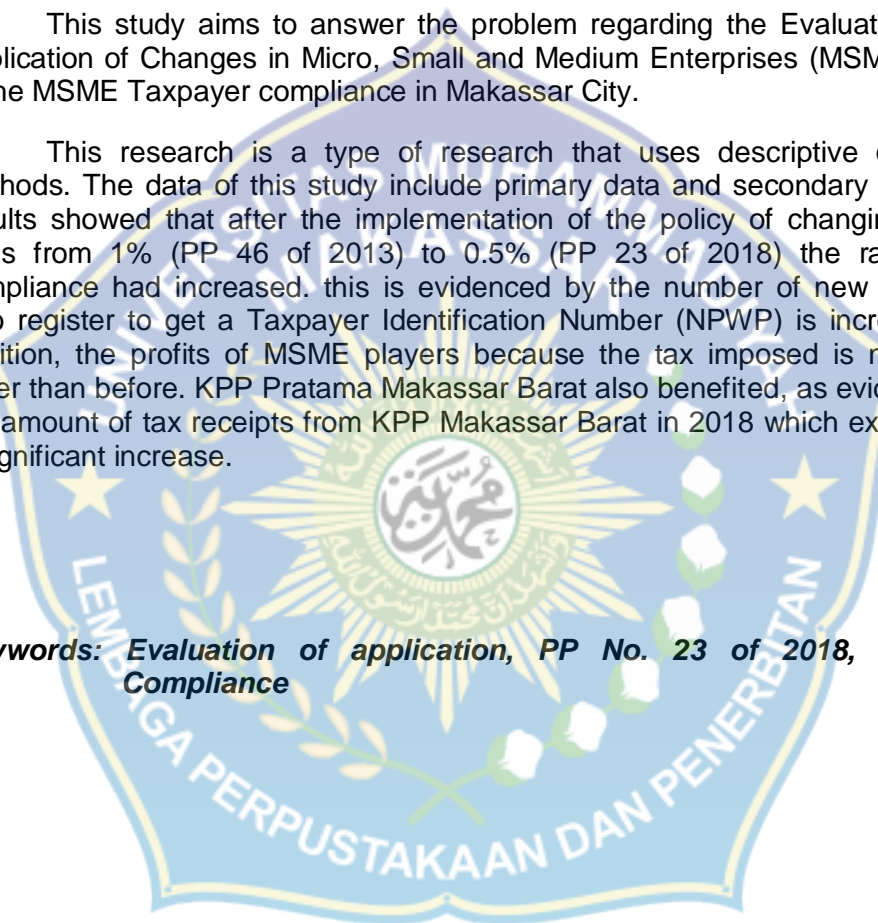
## ABSTRACT

KARMILA OKTAFIANA, 2019. Evaluation Of The Application Of Changes in UMKM Tariffs to The Compliance Of The UMKM Taxpayer in Makassar City, Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business Tax Study Program, Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Advisor I Akhmad and Advisor II Muhaimin.

This study aims to answer the problem regarding the Evaluation of the Application of Changes in Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Tariffs to the MSME Taxpayer compliance in Makassar City.

This research is a type of research that uses descriptive qualitative methods. The data of this study include primary data and secondary data. The results showed that after the implementation of the policy of changing MSME rates from 1% (PP 46 of 2013) to 0.5% (PP 23 of 2018) the rate of tax compliance had increased. this is evidenced by the number of new taxpayers who register to get a Taxpayer Identification Number (NPWP) is increasing. In addition, the profits of MSME players because the tax imposed is now much lower than before. KPP Pratama Makassar Barat also benefited, as evidenced by the amount of tax receipts from KPP Makassar Barat in 2018 which experienced a significant increase.

**Keywords:** *Evaluation of application, PP No. 23 of 2018, Taxpayer Compliance*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti dinerikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para Pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Evaluasi Penerapan Perubahan Tarif UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Makassar”.

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada dua Orang yang selalu menunggu di depan pintu rumah yang selalu menatap bangga dan menaruh harapan besar pada Penulis, Yaitu Kedua Orang tua Penulis Bapak Muh. Darwis S.pd dan Ibu Samindang yang senantiasa memberikan Nasehat, semangat, perhatian, kasih sayang dan Do'a Tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku Kak Enni, Kak Rina, Abang Jamal, Abang Ulla, dan Ade Baso tercinta yang senantiasa mendukung, dan paling depan, sigap memberikan contoh dan bantuan serta memberikan semangat hingga Akhir Studi ini. Sahabat-sahabatku Ahli Pajak Squad Tiara, Tiwi, Wiwi, Nini, Apri, Kiki, Heni, Mega Serta Edwin dan Assida yang tak kenal waktu memberikan bantuan dan Tumpangan ketika Penulis butuh, serta selalu memberikan Apresiasi dan semangat kepada penuli. Upacan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Grab Indonesia yang selalu mengantar selama penelitian berlangsung. Penulis menyadari bahwa Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa Adanya Bantuan dan dorongan dari dari berbagai Pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.



3. Bapak Dr. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA, Selaku Ketua Prodi Perpajakan
4. Bapak Dr. Akhmad.SE., M.Si, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat terselesaikan.
5. Bapak Muhaimin.SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., CACP, Selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Hingga seminar Hasil.
6. Bapak Amran SE., M.Ak., Ak., CA, Yang selalu memberikan Nasehat, bimbingan dan Solusi sampai Akhir Studi.
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Para Staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan (D-III) angkatan 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima Kasih teruntuk semua kerabat yang bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya.

Dengan adanya Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan pembaca dapat memahami Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kota Makassar, serta Keuntungan bagi wajib pajak dengan diterapkannya kebijakan tarif baru 0,5%.

Semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil Haq fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb*

Makassar, 11 Juli 2019

Karmila Oktafiana

## DAFTAR ISI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>MOTTO HIDUP .....</b>                            | <b>ii</b>                           |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                    | <b>iii</b>                          |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                      | <b>iv</b>                           |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                | <b>vi</b>                           |
| <b>ABSTRACT .....</b>                               | <b>vii</b>                          |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                         | <b>viii</b>                         |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>x</b>                            |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                           | <b>xii</b>                          |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                          | <b>xiii</b>                         |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                        | <b>xiv</b>                          |
| <b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>                        | <b>1</b>                            |
| 1.1 Latar Belakang .....                            | 1                                   |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                           | 5                                   |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                          | 5                                   |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                         | 5                                   |
| 1.5 Jadwal Penelitian .....                         | 6                                   |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORI .....</b>                  | <b>7</b>                            |
| 2.1 Landasan Teori .....                            | 7                                   |
| 2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB) ..... | 7                                   |
| 2.1.2 Definisi, Unsur dan Fungsi Pajak .....        | 7                                   |
| 2.1.3 Kepatuhan Perpajakan.....                     | 9                                   |
| 2.1.4 Sanksi Perpajakan.....                        | 9                                   |
| 2.1.5 UMKM .....                                    | 10                                  |
| 2.2 Kerangka Konseptual .....                       | 12                                  |
| 2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian .....             | 14                                  |
| 2.3.1 Tipe Penelitian .....                         | 14                                  |
| 2.3.2 Waktu dan Tempat Penelitian .....             | 15                                  |
| 2.3.3 Jenis Data .....                              | 15                                  |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.3.4 Sumber Data .....  | 16        |
| 2.3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                                    | 17        |
| 2.3.6 Teknik Analisis Data .....                                       | 18        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                   | <b>20</b> |
| 3.1 Profil KPP Makassar Barat .....                                    | 20        |
| 3.2 Struktur Organisasi/ <i>Job Description</i> .....                  | 22        |
| 3.3 Struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat ..... | 23        |
| 3.4 Hasil Penelitian.....  | 26        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                               | <b>33</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 33        |
| B. Saran .....   | 33        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>35</b> |



**DAFTAR TABEL**

| <b>Nomor</b>  | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| 1.1 Rincian Jadwal Kegiatan Penelitian.....           | 6              |
| 3.1 Jumlah Wajib Pajak terdaftar.....                 | 27             |
| 3.2 Jumlah wajib pajak melapor.....                   | 28             |
| 3.3 Jumlah penerimaan KPP Pratama Makassar Barat..... | 30             |



**DAFTAR GAMBAR**

| <b>Nomor</b>  | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| 2.1 Kerangka Konseptual.....                            | 13             |
| 3.1 Struktur Organisasi.....                            | 22             |
| 3.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Barat..... | 24             |



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** Hasil Wawancara

**Lampiran 2** Data Jumlah Wajib Pajak UMKM Melapor

**Lampiran 3** Jumlah Penerimaan

**Lampiran 4** Surat Pengantar Penelitian dari Kampus

**Lampiran 5** Surat Izin dari Kanwil

**Lampiran 6** Surat Keterangan Selesai Penelitian

**Lampiran 7** Dokumentasi selama Penelitian



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak berasal dari (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan definisi Pajak menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan Wajib Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang didapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa di Indonesia Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat adanya pertumbuhan jumlah usaha, khususnya jumlah Usaha Mikro yang meningkat dari tahun 2013 sampai dua tahun berikutnya terus meningkat jumlah UMKM kota Makassar. Sementara

Usaha Kecil tidak mengalami peningkatan melainkan penurunan, di mana Usaha Kecil menurun 2.056, pada tahun 2014 dan dari tahun 2014 ke tahun 2015 jumlahnya justru berkurang sebanyak 316. Untuk Usaha Menengah, jumlahnya hanya bertambah sekitar 321 saja dan belum diketahui jumlahnya pada tahun 2015. Dan Pada Juni 2018 UMKM kota makassar meningkat yakni dengan Jumlah 40.577 Wajib Pajak UMKM kota Makassar. Secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah UMKM di kota Makassar yang terus meningkat menunjukkan semakin banyaknya pengusaha-pengusaha kecil yang bermunculan karena adanya kemudahan dan kesempatan berbisnis di masa kini.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberlakukan pajak 1% untuk pengusaha UMKM dengan omset (peredaran bruto) maksimal hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Nantinya pajak akan dipungut 1% (satu persen) tiap bulan berdasarkan omset penjualan di bulan itu. Aturan pajak penghasilan sebesar 1 % omset untuk mendorong UMKM agar mulai membuat pembukuan usaha secara tertib dengan membuat faktur penjualan dan bukti kuitansi pengeluaran, agar pajak yang dibayar sesuai laba usaha yang sebenarnya. Namun, Peraturan pemerintah ini kemudian di gantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam



Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Sementara aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak UMKM yakni PMK 99/2018 pelaksanaan atas PP nomor 23. Dengan diberlakukannya PP No.23 per tanggal 1 Juli 2018 namun belum adanya peraturan pelaksanaan atas surat keterangan tersebut, menyebabkan kemungkinan penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak final atas peredaran bruto tertentu dikenakan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final. Menjawab pertanyaan terkait SKB PP 46 Tahun 2013 dan legalisasinya, untuk kelancaran dan kepastian operasional di lapangan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengeluarkan surat penegasan S-421/PJ.03/2018 per tanggal 5 Juli 2018.

Presiden Jokowi meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan

memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) menyebutkan, tingkat kepatuhan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam membayar pajak terus membaik berkat penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Jumlah UMKM pembayar pajak sejak akhir pemberlakuan tarif 1 persen pada Juni 2018 tercatat 16.558 orang dengan total setoran sebesar Rp10,554 miliar. Pada Desember 2018 mengalami lonjakan tajam yang menembus angka 40.577 wajib pajak dengan jumlah setoran Rp12,293 miliar. Tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak yang mengalami kenaikan kurang lebih 24 ribu, menjadi kabar positif bagi untuk menambah pendapatan pada tahun ini. kebijakan penurunan tarif ini memberikan keringanan kepada pelaku UMKM. Hal itu sesuai dengan harapan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berkembang tanpa dipusingkan dengan biaya pajak yang tinggi.

Dengan data dan isu di atas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak setelah diterapkan Kebijakan Tarif Baru yakni 0,5%, Dengan Judul Penelitian : “Evaluasi Penerapan Perubahan Tarif UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Makassar (Studi Kasus KPP Makassar Barat)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Makassar Barat setelah adanya kebijakan pajak 0,5% untuk pengusaha UMKM dengan omset (peredaran bruto) maksimal Rp 4,8 miliar per tahun?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Makassar Barat setelah adanya kebijakan pajak 0,5% untuk pengusaha UMKM dengan omset (peredaran bruto) maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi UMKM, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku bisnis di negara Indonesia.
2. Penelitian memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan bagi sektor UMKM untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dan bagi pihak KPP Makassar Barat agar dapat lebih memaksimalkan penerimaan pajak.

3. Penelitian ini diharapkan menjadikan KKP Makassar Barat menjadi contoh atau referensi bagi KKP lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayanan kewajiban pajak masyarakat Makassar.
4. Bagi Peneliti, penelitian ini sangat bermanfaat dan berperan untuk memenuhi Persyaratan Kelulusan di Perguruan Tinggi guna meraih Gelar Ahli Madya perpajakan di program Studi Perpajakan D-III, juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

### 1.5 Jadwal Penelitian

Berikut jadwal kegiatan penelitian :

Tabel 1.1  
Rincian Jadwal Kegiatan Penelitian

| No | Jenis Kegiatan        | Minggu |   |   |   |   |
|----|-----------------------|--------|---|---|---|---|
|    |                       | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Persiapan Penelitian  |        |   |   |   |   |
| 2  | Pengumpulan Data      |        |   |   |   |   |
| 3  | Analisis Data         |        |   |   |   |   |
| 4  | Penulisan             |        |   |   |   |   |
| 5  | Seminar dan Publikasi |        |   |   |   |   |

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* yakni perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir. Berdasarkan TPB, faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu terhadap perilaku tertentu tersebut.

Seseorang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, tetapi pada saat dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk memengaruhi perilaku. Keyakinan yang sedikit inilah yang menonjol dalam memengaruhi perilaku individu.

##### 2.1.2 Definisi, Unsur dan Fungsi Pajak

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Hanya negara yang berhak memungut pajak. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak bagi negara mempunyai fungsi yang sangat penting karena pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Terdapat dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2016:1), yaitu.

a. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.3 Kepatuhan Perpajakan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan (Ghoni, 2012). Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dan memenuhi serta melaksanakan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010:138).

### 2.1.4 Sanksi Perpajakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, sanksi adalah tanggungan berupa tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan penting

karena pemerintah Indonesia menetapkan *Self Assessment System*, dimana sistem ini fiskus memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

### 2.1.5 UMKM

Di dalam Undang Undang UMKM No 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Usaha Kecil dan Menengah secara tegas juga memberikan kriteria dari usaha untuk dikategorikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maks. Rp 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. Rp 300 juta rupiah.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Rp 50 juta – Rp 500 juta, kriteria Omzet: Rp 300 juta – Rp 2,5 Miliar rupiah.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan



yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta – Rp 10 Miliar, kriteria Omzet: >Rp 2,5 Miliar – Rp 50 Miliar rupiah.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterapkan besarnya tarif Pajak Penghasilan ( PPH ) final dengan kategori peredaran bruto tertentu yaitu 0,5 % ( satu persen ). Penerapan tarif 0,5% ini diberlakukan hanya atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan kategori peredaran bruto tertentu. Melihat tarif pajak atas kategori peredaran tertentu yang rendah hanya 0,5%, Wajib Pajak bisa mendapatkan tarif Pajak Penghasilan final atas penghasilan kategori peredaran tertentu, dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas (SKB) atas pemotongan / pemungutan pajaknya dari Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak Pengusaha Kecil.

Aturan PP 23 Tahun 2018 diadaptasi dari *presumptive tax*. *Presumptive tax* adalah pajak yang dikenakan dengan perhitungan yang dilakukan tidak langsung atau melalui suatu perkiraan. Sehingga dengan aturan ini diharapkan penerimaan yang dikumpulkan dapat optimal tanpa memberatkan Wajib Pajak maupun fiskus.

Sebagai kebijakan pajak baru, PP 23 Tahun 2018 dianggap telah mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan ini dapat memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak terutang pajak sebelumnya, sehingga dengan aturan ini mereka terutang pajak dan ikut melakukan pembayaran pajak. Sesuai dengan sifat pajaknya, PP 23 Tahun 2018 merupakan pajak final yang digolongkan pada PPh Pasal 4 ayat (2).

Pada Undang-Undang Perpajakan Negara pasal 17 Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasil dijelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu subjek pajak. Selain meningkatkan pendapatan negara, UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar (Herman, dkk 2013) data penerimaan pajak tahun 2005 hingga 2012 menunjukkan penerimaan pajak didominasi bukan oleh UMKM, namun oleh usaha besar yang jumlah populasinya kurang dari 1%.

## **2.2 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan hubungan logis antara landasan teori dan kajian empiris. Kerangka konseptual menunjukkan pengaruh antar variabel dalam penelitian. Penelitian ini membahas Perubahan Tarif dan modernisasi pada kepatuhan pelaporan wajib pajak Badan UMKM. Teori yang mendasari dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB).

*Theory of planned behavior* menyatakan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. *Theory of Planned Behavior* dapat menjelaskan secara relevan perilaku wajib pajak dalam memenuhikewajiban perpajakannya, Secara sistematis, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1



**Gambar 2.1**

**Kerangka Konseptual**

## **2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian**

### **2.3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi penerapan kebijakan pajak UMKM atau perubahan tarif Terhadap kepatuhan Wajib Pajak, oleh karena itu tipe penelitian yang dipakai menggunakan metode deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian ini bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Peneliti akan menggambarkan penelitiannya dalam bentuk susunan kata dan kalimat sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan peneliti sejak awal. Penelitian ini akan dituliskan dengan sistematis berdasarkan fakta-fakta yang akurat dimana peneliti akan mendeskripsikan dan memaparkan mengenai penerapan perubahan tarif terhadap kepatuhan Wajib pajak KPP Makassar Barat.

### 2.3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

#### a. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1 Bulan yakni Bulan Juni - Juli 2019. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data yang meliputi Penyajian dalam bentuk KTI dan Proses bimbingan berlangsung.

#### b. Tempat

Penelitian ini bertempat di KPP Makassar Barat. Adapun beberapa alasan peneliti memilih tempat itu adalah:

- 1) KPP Makassar Barat merupakan salah satu tempat untuk membayar pajak UMKM Kota Makassar itu sendiri.
- 2) KPP Makassar Barat merupakan tempat yang paling lengkap memiliki informasi seluruh pajak UMKM wilayah Barat di Kota Makassar.

### 2.3.3 Jenis Data

Jenis data dalam pelaksanaan penelitian ini Yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan peneliti yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh

melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada sumber data mengenai Penerapan Perubahan tarif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM Kota Makassar.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer ataupun pihak lain. Data sekunder dapat berupa buku, biografi, media baik *online* maupun cetak yang dalam hal ini dapat mendukung data primer atau dikatakan relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh melalui buku, penelitian-penelitian terdahulu serta media cetak dan *online*.

### 2.3.4 Sumber Data

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan, yaitu orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang koordinasi yang berhubungan dengan penerapan perubahan Tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kota Makassar.
2. Pembukuan dan Pelaporan pajak KPP Makassar Barat.
3. Dokumen-Dokumen yaitu dokumen yang berkaitan dengan kebijakan Penerapan Perubahan tarif yang diperoleh dari berbagai sumber meliputi peraturan-peraturan daerah, surat-surat keputusan, catatan-catatan Yang dianggap diperlukan, arsip-arsip, foto dan dokumen-

dokumen yang terkait dengan penerapan perubahan Tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kota Makassar.

### 2.3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Percakapan tersebut dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) atau informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dan jawaban-jawaban dari informan tersebut dicatat atau direkam oleh peneliti.

Pihak yang di wawancarai pada penelitian ini yakni informan yang memiliki informasi lebih mengenai penelitian ini serta Beberapa Wajib pajak.

#### 2. Observasi

Mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Pada penelitian ini observasi menjadi hal yang penting digunakan dengan tujuan agar peneliti dapat melihat gambaran yang jelas terkait fakta dilapangan yang menyangkut Penerapan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Makassar.

### 3. Dokumentasi

Teknik untuk melengkapi data dalam rangka analisis yang diteliti, maka memerlukan informasi dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa Peraturan Pemerintah, keputusan-keputusan, serta arsip-arsip lain yang terkait Penerapan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Makassar.

#### 2.3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran (deskripsi) tentang suatu fenomena yang terjadi. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai beberapa hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data :

##### 1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses sebagai pemilihan, pemisahan, penyederhanaan, merangkum, pengabsrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan terperinci. Laporan dilapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama



proses penelitian berlangsung. Laporan atau data lapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci.

## 2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir kedalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

## 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusiondrawing /verification*).

Selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama penyimpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang *tentative*.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Profil KPP Makassar Barat**

Genderang modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, melahirkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat merupakan hasil pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Terhitung mulai tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat efektif beroperasi dan resmi di-launching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat terletak di Jalan Balaikota Nomor 15 Makassar menempati bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Makassar. Adapun wilayah yang menjadi wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalate. Berbagai Prestasi pun telah diraih. Pada tahun 2012 KPP Makassar Barat berhasil mengamankan target penerimaan, bahkan menjadi salah satu dari 5 Kantor pelayanan pajak dengan capaian penerimaan tertinggi tingkat Nasional.

Pada awal mula beroperasi KPP Pratama Makassar Barat terdiri dari 1 Pjs. Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 *Account Representative* dan 54 Pelaksana. Selanjutnya dengan diterbitkannya SK Mutasi untuk Eselon IV No.KEP-128/PJ/UP.53/2008 tanggal 9 Juni 2008 dan Mutasi/Pengangkatan pertama Fungsional pemeriksa pajak serta dengan adanya pegawai yang pensiun, maka sampai dengan penyelesaian mapping ini, KPP Pratama Makassar Barat terdiri dari 1 Pjs. Kepala Kantor, 8 Orang Kepala Seksi, 7 Fungsional Pemeriksa Pajak, 1 Fungsional Penilai, 10 Account Representative dan 53 Pelaksana.

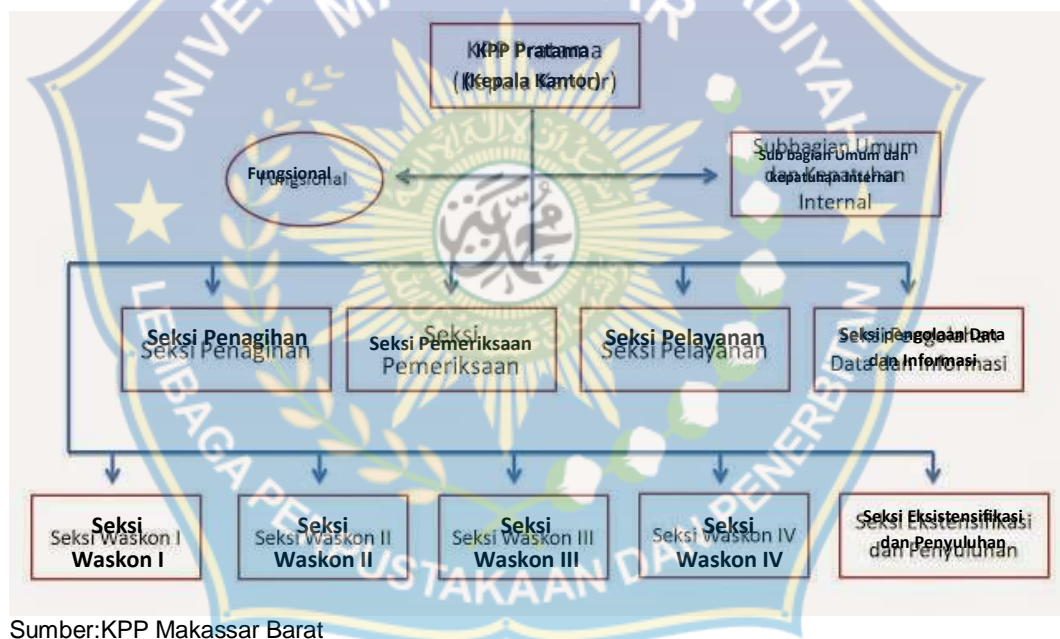
Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ada kegiatan yang disebut ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak, sehingga jumlah wajib pajaknya dan Jumlah penerimaan dapat selalu bertambah seiring dengan penambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya. Dengan demikian, jenis wajib pajak yang dikelola terdiri atas orang pribadi, badan, maupun sebagai pemotong atau pemungut pajak (seperti bendaharawan instansi pemerintah). Jenis pajak yang dikelola di KPP pratama, yakni pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan bea materai.

KPP Pratama Makassar Barat dari masa ke masa memberikan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus dan memberikan pelayanan terbaik Kepada wajib pajak Sesuai dengan Motto KPP

Makassar Barat “PASTI” : Profesional, Adil, Senyum, Tepat Waktu, Ikhlas. KPP Makassar Barat terbukti dengan masuknya Sebagai 3 besar kantor pelayanan pajak terbaik tingkat Kanwil selama 3 tahun berturut-turut yakni, Juara 2 pada tahun 2012, Juara 3 tahun 2013, dan pada tahun 2014 mewakili Kanwil DJP Sutan Batara untuk maju ke tingkat Nasional.

### 3.2 Struktur Organisasi/Job Description

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat Tahun 2019 sesuai PMK-206.02/PMK.01/2014.



Sumber:KPP Makassar Barat

**Gambar 3.1**

### **Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat**

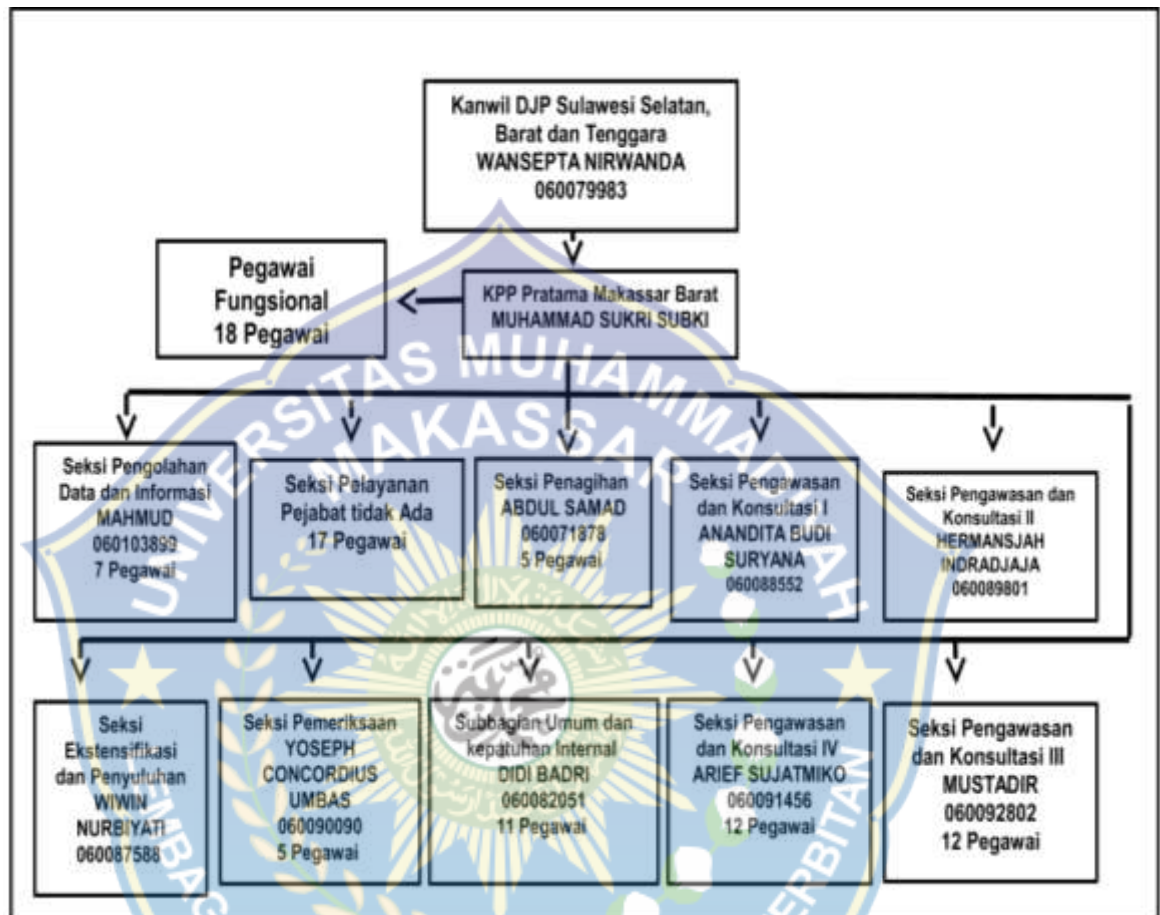
Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, Penerimaan dan pengolahan surat.
4. Pemberitahuan, Serta penerimaan surat lainnya.
5. Penyuluhan perpajakan.
6. Pelayanan perpajakan.
7. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.
8. Pelaksanaan ekstensifikasi.
9. Pengurangan sanksi pajak.
10. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
11. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
12. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
13. Pembetulan penetapan pajak.
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

### **3.3 Struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat dapat dilihat pada Gambar 3.2 Berikut.



Sumber: KPP Pratama Makassar Barat (2019)

**Gambar 3.2**

### **Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Barat**

Tugas dan Fungsi masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian

intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*, serta pengelolaan kinerja organisasi.
3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, dan pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
4. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, Penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan

pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, dan penyuluhan perpajakan.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak.

#### **3.4 Hasil Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menemukan fakta-fakta di lapangan mengenai penerapan kebijakan perubahan tarif UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kota Makassar dengan studi Kasus di KPP Makassar Barat.



## 1. Jumlah Wajib Pajak terdaftar

Berikut ini pertumbuhan Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat di sajikan dalam bentuk Tabel 3.1 berikut:

### Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

|                               | 2016          | 2017          | 2018          |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>WP Terdaftar Wajib SPT</b> | <b>62.149</b> | <b>63.132</b> | <b>52.478</b> |
| • Badan                       | 3.762         | 3.522         | 4.319         |
| • OP Non Karyawan             | 4.958         | 5.830         | 5.833         |
| <b>Total</b>                  | <b>8.720</b>  | <b>9.352</b>  | <b>10.152</b> |

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat (2019)

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar**

Tercatat jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar pada tahun 2016 berjumlah 8.720 wajib pajak. Dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2017 Jumlah wajib pajak UMKM mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 9.352 wajib pajak dan tahun 2018 pertumbuhan wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Barat mengalami peningkatan yang sangat besar yakni tercatat 10.152 Wajib Pajak UMKM. Administrator KPP Pratama Makassar Barat Pak Aziz mengatakan bahwa, diterapkannya Kebijakan tarif 0,5% memudahkan menghimbau masyarakat terutamanya Wajib pajak UMKM yang baru, untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak UMKM. Penerapan kebijakan tarif 0,5% ini juga lebih memudahkan untuk menggaet atau

mencari Wajib pajak baru ke mall-mall atau pasar-pasar yang usahanya masih kecil, karena tarif yang di tarawarkan lebih kecil yakni 0,5% jadi wajib pajak lebih mau mendaftar dan membayar pajaknya. Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Makassar Barat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Hal ini didukung oleh Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah yakni PP 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan sebelumnya yakni 1% dianggap memberatkan dikalangan Wajib Pajak UMKM, dengan diterapkannya tarif baru 0,5% Wajib Pajak lebih patuh dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib Pajak UMKM.

## 2. Data Wajib Pajak yang melapor

Berikut ini pelaporan Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2016-2018 di sajikan dalam bentuk Tabel 3.2 berikut:

| No | Tahun | Jumlah Pelapor | Persentase |
|----|-------|----------------|------------|
| 1. | 2016  | 3.833          | 43,9%      |
| 2. | 2017  | 3.436          | 36,7%      |
| 3. | 2018  | 3.025          | 29,8%      |

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat (2019)

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Wajib Pajak Melapor**

Tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak UMKM dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan mencapai 3.833 Wajib pajak atau 43,9% dari wajib

pajak UMKM yang terdaftar. Tahun 2017 jumlah wajib Pajak yang melakukan pelaporan menurun menjadi 36,7% dari tahun sebelumnya yakni berjumlah 3.436 wajib pajak dan Pada tahun 2018 terjadi Penurunan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya yakni hanya mencapai 29,8% saja dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat dengan Jumlah pelapor 3.025 wajib pajak. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Barat Pak Mahmud mengatakan bahwa, Naik atau turunnya Wajib Pajak yang melaporkan Pajaknya sebenarnya tidak ada acuan. Dengan penerapan Tarif baru ini sebenarnya lebih fokus pada Kuantitas dan kualitas pembayaran pajaknya dan juga diikuti dengan kepatuhan. Penurunan tarif ini diharapkan Wajib pajak yang sudah terdaftar, yang notabeneanya masih dibawah 4.8 Milyar pertahun lebih banyak yang mau membayar. Kemudian yang kedua turunnya tarif UMKM ini sebenarnya membantu para pelaku UMKM, karena selama ini tarif 1% yang di atur PP 49 Tahun 2013 di anggap memberatkan bagi mereka, maka dari itu dengan turunnya tarif menjadi 0,5% setidaknya semangat untuk membayar pajaknya lebih meningkat dan lebih patuh pada kewajiban pajaknya.

Penurunan wajib pajak yang melaporkan pajaknya tiap tahun disebabkan karena asumsi sebagian besar wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM bahwa setelah melakukan penyetoran/ pembayaran pajak, wajib pajak tidak diwajibkan lagi untuk melaporkan pajaknya. Namun aturan perpajakan yang berlaku, para wajib pajak diwajibkan

untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri atau dengan kata lain *Self Assessment system*.

### 3. Penerimaan KPP Pratama Makassar Barat

Realisasi penerimaan KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2016-2018 di sajikan dalam Tabel 3.3 berikut:

| Bulan | Target               | PenerimaanPertahun   | Capai   | Tumbuh |
|-------|----------------------|----------------------|---------|--------|
| 2016  | 6.286.266.800.092,00 | 5.213.774.199.487,00 | 76,90%  | 30,47% |
| 2017  | 5.964.790.393.630,00 | 4.824.370.282.477,00 | 83,25%  | 3,91%  |
| 2018  | 5.802.874.840.000,00 | 5.613.467.912.272,00 | 102,26% | 19,07% |

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat (2019)

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penerimaan KPP Pratama Makassar Barat**

Penerimaan KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2016 mencapai Rp.5.213.774.199.487,00 capaian dari target pada tahun 2016 ini mencapai 76,90% dengan pertumbuhan penerimaan KPP Pratama Makassar Barat mencapai 30,47%. Pada tahun 2017 penerimaan KPP Pratama Makassar Barat mengalami penurunan. Penerimaan tahun 2017 hanya mencapai Rp.4.824.370.282.477,00 yakni 83,25% dari target penerimaan pada tahun 2017 dengan pertumbuhan yang sangat kecil pula yaitu 3,91% saja. Penurunan penerimaan KPP Pratama Makassar Barat ini di sebabkan karena kerugian Usaha yang dialami oleh Pelaku wajib Pajak UMKM sehingga banyak Wajib Pajak UMKM berpenghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga pajak yang di tanggung oleh wajib pajak dikecualikan atau Nihil. Pada tahun 2018

setelah diterapkannya kebijakan penurunan tarif menjadi 0,5% penerimaan KPP Makassar Barat meningkat sangat besar hingga mencapai Rp. 5.613.467.912.272,00 dengan persentase 102,26% dari target penerimaan dan tumbuh 19,07% dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Barat Pak Mahmud mengatakan bahwa, awal Sebelum diterapkannya tarif 0,5% beranggapan Penerimaan KPP Makassar Barat akan mengalami Penurunan dikarenakan penurunan tarif. Namun, setelah diterapkan Kebijakan ini, Penerimaan KPP Makassar Barat Justru mengalami peningkatan. Kebijakan PP nomor 23 tahun 2018 ini memberikan peluang kepada wajib pajak UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan cara menurunkan tarif pajaknya menjadi 0,5%. Dengan demikian, usaha Para wajib pajak berkembang, Omset yang mereka milikipun meningkat, yang menyebabkan penghasilan wajib Pajak diatas PTKP dan terbebas dari pengecualian Wajib pajak yang pembayarannya Nihil, kini dikenakan 0,5%. Wajib Pajak Badan non UMKM Pak Amran mengatakan bahwa, penerapan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% sangat bagus dan pastinya menguntungkan wajib pajak pelaku UMKM, karena beban pajak yang harus dibayarkan yang tadinya 1% sekarang di turunkan menjadi 0,5%. Penerapan kebijakan ini pastinya menambah semangat wajib pajak UMKM dalam mengembangkan usaha karena tarif yang dikenakan kini lebih kecil. Dengan semangat para Pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dapat menjadikan

meraka sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak yang ditanggungnya dikarenakan berpenghasilannya di atas PTKP. Dengan diterapkannya kebijakan perubahan tarif UMKM 0,5% ini memancing para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dan berpenghasilan di atas PTKP dengan demikian Jumlah penerimaan dapat selalu bertambah seiring dengan penambahan Wajib Pajak UMKM yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisa data penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Setelah diterapkannya kebijakan perubahan tarif UMKM dari 1% menjadi 0,5% kepatuhan wajib pajak Mengalami Peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah wajib pajak baru semakin patuh untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak.
2. Diterapkannya tarif baru 0,5% memberikan keringanan dan keuntungan kepada pelaku UMKM sehingga beban pajak yang harus dibayarkan kini jauh lebih rendah dari sebelumnya.
3. KPP Pratama Makassar Barat memperoleh keuntungan dengan diterapkannya kebijakan tarif 0,5% bagi UMKM, dibuktikan dari jumlah penerimaan pajak KPP Makassar Barat pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat besar.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk KPP Pratama Makassar Barat :
  - a. KPP Pratama Makassar Barat perlu meningkatkan Upaya sosialisasi kepada Pelaku UMKM tentang pentingnya melakukan

- b. pelaporan pajak setelah melakukan penyetoran/ pembayaran pajak.
  - c. KPP Pratama Makassar Barat perlu meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penggalian potensi wajib pajak Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
  - d. Kebijakan PP 23 tahun 2018 alangkah baiknya dilaksanakan dalam jangka panjang.
2. Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan perekonomian, kesadaran pajak harus ditanamkan pada setiap wajib pajak.
  3. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti disarankan melakukan wawancara kepada beberapa wajib pajak UMKM, karena dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan wawancara kepada beberapa wajib pajak, sehingga tanggapan dari wajib pajak khususnya UMKM tidak dapat disimpulkan secara signifikan.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat Jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ghoni, Husen Abdul. 2012. *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Surabaya.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: andi
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Buku 1. Edisi revisi. Jakarta: Andi publisher
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Rahayu, s. K. (2010). *Perpajakan indonesia (konsep dan aspek sosial)*. Yogyakarta: graha ilmu.
- Sofyandi, Herman. 2013. *Manajemen Sumber daya Manusia Cetakan kedua*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### Undang-undang& Peraturan Pemerintah

- Direktorat jenderal pajak. (2015). *Realisasi penerimaan pajak per 30 april 2015*. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-30-april-2015/> 17 Februari 2019/ 11.19)
- Kementerian koperasi & ukm. (2013). *Statistik usaha kecil, mikro dan menengah*,diaksesdari<http://www.depkop.go.id/phocadownload/>
- Menteri keuangan republik indonesia.2014. Nomor 206.2/pmk.01/2014 tanggal 17 oktober 2014 *tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 167/pmk.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak*. Struktur kantor pelayanan pajak pratama.
- Peraturan pemerintah no 46 tahun 2013. 2013. *Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu*.
- Undang-undang No.16 Tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.*

Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 *tentang pajak penghasilan.*

Data\_statistik/statistik\_umk/narasi\_statistik\_umkm%202010-2011.pdf./ 17 Februari 2019/ 10.25)

## Jurnal

Aneswari, yuyung rizka. 2018. *Membongkar imperialisme dalam kebijakan pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm).* *Jurnal infestasi* vol. 14 no. 1 juni 2018 hal. 1 – 10.

Dariansyah s, deddy. 2016. *Penerapan pajak penghasilan (pph) final terhadap usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berdasarkan pp no 46 tahun 2013.* *Sosio-e-kons*, vol. 8 no. 3, desember 2016, hal. 251-260.

Ibrahim,s. (n.d.). 2013. *Pengenaan pph final untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, sebuah konsep kesederhanaan pengenaan pph untuk meningkatkan voluntary tax compliance.* *Pusat kebijakan pendapatan negara - badan kebijakan fiskal.* Retrieved from [www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kebijaksanaan\\_pph\\_final\\_umkm\\_pkpn.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kebijaksanaan_pph_final_umkm_pkpn.pdf).

Prabantari, faizara dan ardiyanto, moh. Didik. 2017. *Implementasi pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 (studi pada umkm di jawa tengah dan daerah istimewa)*

Sa'diya, maulida alfi lofiana, handayani, siti ragil dan effendy, idris. 2016. *Analisis penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (studi pada kpp pratama malang utara).* *Jurnal perpajakan (jejak)* vol. 10 no. 1 2016 hal. 1-7.

yogyakarta). *Diponegoro journal of accounting* volume 6, nomor 4, tahun 2017, halaman 1-12.

Yusuf,e. M. (2013). *Membedah aturan pajak penghasilan terbaru bagi umkm.* Retrieved september 16, 2015, from <http://keuanganlsm.com/membedah-aturan-pajak-penghasilan-terbaru-bagi-umkm/>

Zawitri, sari dan yuliana, elsa sari. 2016. *Tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha mikro kecil dan menengah setelah diberlakukan tarif 1 % (final) pph (studi kasus di kpp pratama pontianak).* *Jurnal ekonomi, bisnis dan kewirausahaan* 2016, vol. 5. No.2, 144-162.

L

A

M

P

I

R

A

N



## Lampiran 1

### HASIL WAWANCARA

#### Daftar Responden

| NO | NAMA       | KEDUDUKAN   |
|----|------------|---|
| 1. | Pak Mahmud | Kepala seksi Informasi dan pengolahan data KPP Makassar Barat |
| 2. | Pak Aziz   | Administrator KPP Makassar Barat                              |
| 3. | Pak Amran  | Wajib Pajak   |
| 4. | Pak Aswar  | Wajib Pajak UMKM  |

#### Hasil Wawancara

Berikut merupakan petikan yang peneliti lakukan dengan beberapa Responden.

#### 1. Pak Mahmud Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

|            |  |
|------------|--|
| Peneliti   | Bagaimana tanggapan bapak tentang penerapan kebijakan penurunan tarif UMKM menjadi 0.5%?   |
| Pak Mahmud | Menurut Pak Mahmud, kita sebagai orang lapangan, apapun yang di perintahkan atasan harus dilaksanakan, penurunan tarif ini adalah Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2013, Jadi sebagai petugas pajak kita harus mendukung dan melaksanakan perintah ini.   |
| Peneliti   | Apakah penurunan tarif ini meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak?   |
| Pak Mahmud | Menurut Pak Mahmud, Naik atau turunnya Wajib Pajak yang melaporkan Pajaknya sebenarnya tidak ada acuan. Dengan penerapan Tarif baru ini sebenarnya lebih fokus pada Kuantitas dan kualitas pembayaran pajaknya dan juga diikuti dengan kepatuhan. Penurunan tarif ini diharapkan Wajib pajak yang sudah terdaftar, yang notabeneanya masih dibawah 4.8 Miliyar pertahun lebih banyak yang mau membayar, kemudian yang kedua turunnya tarif UMKM ini sebenarnya membantu para pelaku Usaha, karena selama ini tarif 1% yang di atur PP 49 Tahun 2013 di anggap memberatkan bagi mereka, |

|            |  |
|------------|--|
|            | maka dari itu dengan turunnya tarif menjadi 0,5% setidaknya semangat untuk membayar pajaknya lebih meningkat dan lebih patuh pada kewajiban pajaknya.  |
| Peneliti   | Apakah Penerapan Kenijakan Penurunan tarif ini meningkatkan Penerimaan KPP Makassar Barat?   |
| Pak Mahmud | Menurut Pak Mahmud, awal Sebelum diterapkannya tarif 0,5% ini kami berfikir bahwa Penerimaan KPP Makassar Barat akan mengalami Penurunan dikarenakan penurunan tarif. Namun, setelah diterapkan Kebijakan ini, Penerimaan KPP Makassar Barat justru mengalami peningkatan. Kebijakan PP nomor 23 tahun 2018 ini memberikan peluang kepada wajib pajak UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan cara menurunkan tarif pajaknya menjadi 0,5%. Dengan demikian, usaha Para wajib pajak berkembang, Omset yang mereka milikipun meningkat, yang menyebabkan Wajib pajak yang pembayarannya Nihil, kini dikenakan 0,5%. |
| Peneliti   | Upaya apa saja yang telah dilakukan KPP Makassar barat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM setelah di terapkannya tarif 0,5%?  |
| Pak Mahmud | Menuru pak Mahmud, Upaya yang telah dilakukan sejauh ini adalah melakukan sosialisasi baik Offline/ penyuluhan langsung kepada masyarakat maupun secara online, yakni sosialisasi dengan menggunakan sistem teknologi informasi, instagram, facebook, Whatsapp dll. Agar Para wajib pajak terdorong untuk melaporkan pajaknya.   |
| Peneliti   | Kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Kepatuhan wajib pajak?   |
| Pak Mahmud | Menurut Pak Mahmud, Kendala Utama sebenarnya lebih fokus pada kemauan wajib pajak itu sendiri dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.  |

## 2. Pak Aziz selaku Administrator sistem KPP Makassar Barat

|          |   |
|----------|---|
| Peneliti | Apa dampak yang timbul atau di rasakan KPP Makassar Barat setelah diterapkan kebijakan tarif UMKM dari 1% menjadi 0,5%? |
|----------|---|

|          |   |
|----------|---|
|          |   |
| Pak Aziz | Menurut Pak Aziz, Dampak yang paling mencolok pastinya mengarah pada tingkat penerimaan pajak KPP Makassar Barat itu sendiri, karena yang tadinya tarif untuk pelaku UMKM adalah 1% dan sekarang cuman 0,5%.  |
| Peneliti | Apakah dengan diterapkannya tarif pajak UMKM 0,5% berdampak pada peningkatan wajib pajak yang melaporkan pajaknya?  |
| Pak Aziz | Menurut Pak Aziz, Tingkat kepatuhan wajib pajak setelah diterapkan kebijakan tarif baru 0,5% berada pada taraf normal, karena sebenarnya Kepatuhan wajib pajak tergantung pada kesadaran wajib pajak itu sendiri  |
| Peneliti | Secara Umum kendala apa yang dihadapi KPP Makassar Barat dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak setelah diterapkan kebijakan Tarif UMKM 0,5%?   |
| Pak Aziz | Menurut Pak Aziz, secara Umum Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah masih banyak Wajib pajak yang belum melek internet dan teknologi sampai saat ini, apalagi sekarang membayar dan melapor pajak menggunakan sistem teknologi, hal ini banyak Wajib pajak yang dalam keadaan Gaptex (gagal teknologi) mengurungkan niatnya untuk melporkan pajaknya. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak tergantung pada kemauan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri |
| Peneliti | Apa keuntungan atau manfaat yang dirasakan KPP Makassar Barat dengan diterapkannya kebijakan 0,5% ?   |
| Pak Aziz | Menurut Pak Aziz, keuntungannya itu kita lebih mudah menghimbau masyarakat terutamanya Wajib pajak UMKM yang baru dan lebih mudah untuk menggaet mencari Wajib pajak baru ke mall-mall atau pasar-pasar yang usahanya masih kecil itu lebih mudah, karena tarif yang di tarawarkan lebih kecil yakni 0,5% jadi pasti wajib pajak lebih mau membayar pajaknya.   |

### 3. Pak Amran selaku Wajib Pajak Badan

|           |   |
|-----------|---|
| Peneliti  | Bagaimana tanggapan bapak mengenai penerapan kebijakan tarif UMKM 0,5%?   |
| Pak Amran | Menurut Pak Amran, penerapan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% sangat bagus dan pastinya menguntungkan wajib pajak pelaku UMKM, karena beban pajak yang harus dibayarkan yang tadinya 1% sekarang di turunkan menjadi 0,5%. Penerapan kebijakan ini pastinya menambah semangat wajib pajak UMKM dalam mengembangkan usaha karena tarif yang dikenakan kini lebih kecil.   |
| Peneliti  | Biasanya Kendala apa yang dihadapi Wajib pajak dalam melaporkan pajaknya?   |
| Pak Amran | Menurut Pak Amran, kendala yang paling sering dihadapi wajib pajak adalah cara penggunaan teknologi dalam melaporkan atau melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pada umumnya pelaku UMKM masih banyak yang kurang paham bagaimana cara menggunakan sistem pelaporan pajak onlinenya, sehingga tak sedikit wajib pajak tidak berkeinginan dalam melaporkan pajaknya dan merasa direpotkan akan hal itu. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya bayar pajak juga masih sangat sedikit sehingga banyak Wajib pajak UMKM tidak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. |

### 4. Pak Aswar selaku Wajib Pajak UMKM

|           |  |
|-----------|--|
| Peneliti  | Sebagai pelaku atau wajib pajak UMKM bagaimana tanggapan bapak mengenai penerapan kebijakan tarifUMKM 0,5%?  |
| Pak Aswar | Menurut bapak Aswar, penerapan kebijakan tarif UMKM ini sangat bagus, apagi saya sebagai Pelaku UMKM merasa sangat diuntungkan dalam kebijakan ini. Siapa sangka tarif yang tadinya berlaku 1% kemudian sekarang sisa 0,5% tentu saja sangat menguntungkan karena lebih hemat 0,5%. Kami sebagai wajib pajak tentunya sangat berharap akan ada kebijakan-kebijakan seperti ini yang tidak membebankan wajib pajak atau kami pelaku UMKM. |

|           |  |
|-----------|--|
| Peneliti  | Apa keuntungan yang dirasakan Pelaku UMKM dengan diterapkannya tarif 0,5% ini?   |
| Pak Aswar | Menurut bapak Aswar, Keuntungan yang dirasakan Wajib pajak Pelaku UMKM tentu saja pajak yang di tanggung lebih sedikit, sehingga kita lebih hemat 0,5%.  |
| Peneliti  | Kendala apa yang biasanya dihadapi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak   |
| Pak Aswar | Menurut bapak Aswar, kalau saya pribadi, tidak ada kendala. Namun tat kala ada wajib pajak yang kurang paham dengan cara membayar atau melaporkan pajaknya dengan menggunakan teknologi. Sehingga hal ini terkadang dijadikan beban oleh wajib pajak UMKM. |





## Lampiran 2

Berikut Data Wajib pajak yang melaorkan pajaknya yang menggunakan kebijakan PP nomor 49 tahun 2013 (2016-juni 2018) dan PP nomor 23 tahun 2018 (juli 2018-Desember 2018).

### 1. 2016

| NO | JENIS USAHA  | JUMLAH WP |
|----|--|-----------|
| 1  | ANGGOTA MILITER DAN KEPOLISIAN                                   | 2         |
| 2  | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS                            | 4         |
| 3  | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM                              | 1         |
| 4  | ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)                     | 2         |
| 5  | ANGKUTAN BUS KOTA  | 3         |
| 6  | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG                           | 2         |
| 7  | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG                   | 1         |
| 8  | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG                  | 1         |
| 9  | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG              | 1         |
| 10 | ANGKUTAN OJEK MOTOR  | 3         |
| 11 | ANGKUTAN PERKOTAAN   | 2         |
| 12 | ANGKUTAN SEWA  | 3         |
| 13 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG       | 1         |
| 14 | BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH                             | 1         |
| 15 | BANK PEMERINTAH/BUMN/PERSERO                                     | 3         |
| 16 | BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR                                     | 2         |
| 17 | DANA PENSIUN   | 1         |
| 18 | DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM                                    | 2         |
| 19 | DEKORASI INTERIOR  | 8         |
| 20 | FASILITAS BILLIARD   | 1         |
| 21 | HOTEL BINTANG DUA  | 4         |
| 22 | HOTEL BINTANG LIMA   | 2         |
| 23 | HOTEL BINTANG SATU   | 1         |
| 24 | HOTEL BINTANG TIGA   | 2         |
| 25 | HOTEL MELATI   | 15        |
| 26 | INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL                               | 6         |
| 27 | INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU                   | 6         |
| 28 | INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA | 4         |
| 29 | INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL                          | 1         |
| 30 | INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA          | 1         |
| 31 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA  | 2         |
| 32 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN                    | 1         |
| 33 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA                         | 2         |
| 34 | INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL                               | 1         |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 35 | INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI          | 44 |
| 36 | INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET | 1  |
| 37 | INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA                             | 2  |
| 38 | INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU   | 2  |
| 39 | INDUSTRI KECAP  | 1  |
| 40 | INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER                          | 1  |
| 41 | INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA           | 1  |
| 42 | INDUSTRI KUE BASAH  | 2  |
| 43 | INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA                                | 1  |
| 44 | INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Logam                    | 2  |
| 45 | INDUSTRI MINUMAN RINGAN   | 11 |
| 46 | INDUSTRI MINYAK ATSIRI  | 1  |
| 47 | INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI                                      | 1  |
| 48 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL                               | 11 |
| 49 | INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI                                   | 1  |
| 50 | INDUSTRI PENCETAKAN UMUM  | 26 |
| 51 | INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN           | 2  |
| 52 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN                       | 1  |
| 53 | INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL                           | 1  |
| 54 | INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA                  | 1  |
| 55 | INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK                  | 1  |
| 56 | INDUSTRI PERMATA  | 1  |
| 57 | INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA   | 1  |
| 58 | INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA   | 1  |
| 59 | INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE  | 12 |
| 60 | INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA                   | 1  |
| 61 | INDUSTRI SIROP  | 1  |
| 62 | INDUSTRI TAHU KEDELAI   | 2  |
| 63 | INDUSTRI TEMPE KEDELAI  | 3  |
| 64 | INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL   | 2  |
| 65 | INSTALASI LISTRIK   | 3  |
| 66 | INSTALASI MEKANIKAL   | 2  |
| 67 | INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA                                     | 6  |
| 68 | INSTALASI TELEKOMUNIKASI  | 2  |
| 69 | JAMINAN SOSIAL WAJIB  | 1  |
| 70 | JASA AGEN PERJALANAN WISATA   | 19 |
| 71 | JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK                   | 1  |
| 72 | JASA ARSITEKUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI                | 15 |
| 73 | JASA BINATU   | 14 |
| 74 | JASA BIRO PERJALANAN WISATA   | 10 |
| 75 | JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)                       | 19 |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 76  | JASA EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)  | 5  |
| 77  | JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)  | 4  |
| 78  | JASA EVENT ORGANIZER  | 8  |
| 79  | JASA FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN JASA KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA  | 16 |
| 80  | JASA FOTOGRAFI  | 23 |
| 81  | JASA HUKUM  | 9  |
| 82  | JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI  | 2  |
| 83  | JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam  | 3  |
| 84  | JASA KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN   | 4  |
| 85  | JASA KEBUGARAN LAINNYA  | 1  |
| 86  | JASA KEGIATAN SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG | 1  |
| 87  | JASA KEGIATAN SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN   | 3  |
| 88  | JASA KEGIATAN SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI LAINNYA   | 1  |
| 89  | JASA KEGIATAN SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI UNTUK JOMPO DAN CACAT   | 1  |
| 90  | JASA KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS  | 1  |
| 91  | JASA MULTIMEDIA LAINNYA   | 4  |
| 92  | JASA PANGKAS RAMBUT   | 2  |
| 93  | JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR   | 1  |
| 94  | JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU   | 2  |
| 95  | JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS  | 3  |
| 96  | JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN  | 3  |
| 97  | JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA   | 1  |
| 98  | JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA  | 5  |
| 99  | JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  | 1  |
| 100 | JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA   | 2  |
| 101 | JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI  | 1  |
| 102 | JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA  | 1  |
| 103 | JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH  | 1  |
| 104 | JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA  | 7  |
| 105 | JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI   | 1  |
| 106 | JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH  | 1  |
| 107 | JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  | 2  |
| 108 | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA   | 2  |
| 109 | JASA PENGEPAKAN   | 1  |
| 110 | JASA PENGUJIAN LABORATORIUM   | 1  |
| 111 | JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)  | 14 |
| 112 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA   | 2  |
| 113 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL  | 6  |
| 114 | JASA PENUNJANG HIBURAN  | 2  |
| 115 | JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL   | 4  |
| 116 | JASA PENUNJANG KELISTRIKAN  | 4  |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 117 | JASA PENUNJANG PENCETAKAN  | 1   |
| 118 | JASA PENYALURAN TENAGA KERJA   | 1   |
| 119 | JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU  | 1   |
| 120 | JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI   | 5   |
| 121 | JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN  | 3   |
| 122 | JASA PENYELIDIKAN  | 1   |
| 123 | JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN   | 1   |
| 124 | JASA PERANCANGAN KHUSUS  | 1   |
| 125 | JASA PERANTARA MONETER LAINNYA   | 31  |
| 126 | JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL   | 176 |
| 127 | JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA   | 16  |
| 128 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK   | 1   |
| 129 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA   | 3   |
| 130 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR  | 1   |
| 131 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH | 2   |
| 132 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI                              | 4   |
| 133 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL                 | 1   |
| 134 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL                        | 1   |
| 135 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL                      | 1   |
| 136 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA  | 10  |
| 137 | JASA PERSEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA   | 2   |
| 138 | JASA POLIKLINIK SWASTA   | 2   |
| 139 | JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL   | 1   |
| 140 | JASA REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT  | 3   |
| 141 | JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR  | 1   |
| 142 | JASA REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN  | 6   |
| 143 | JASA REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA  | 1   |
| 144 | JASA REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA  | 6   |
| 145 | JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS   | 1   |
| 146 | JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM   | 3   |
| 147 | JASA REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI   | 4   |
| 148 | JASA REPARASI PERALATAN LAINNYA  | 3   |
| 149 | JASA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA  | 4   |
| 150 | JASA REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN   | 2   |
| 151 | JASA REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP                              | 1   |
| 152 | JASA RUMAH SAKIT SWASTA  | 4   |
| 153 | JASA SALON KECANTIKAN  | 58  |
| 154 | JASA SISTEM KOMUNIKASI   | 2   |
| 155 | KARAOKE  | 3   |
| 156 | KEDAI MAKANAN  | 59  |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 157 | KEDAI MINUMAN   | 15  |
| 158 | KEGIATAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA   | 1   |
| 159 | KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL  | 1   |
| 160 | KEGIATAN HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA  | 3   |
| 161 | KEGIATAN JASA INFORMASI LAINNYA YTDL  | 1   |
| 162 | KEGIATAN KANTOR PUSAT   | 3   |
| 163 | KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA   | 1   |
| 164 | KEGIATAN ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA  | 7   |
| 165 | KEGIATAN ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT  | 1   |
| 166 | KEGIATAN ORGANISASI KEAGAMAAN   | 1   |
| 167 | KEGIATAN ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL  | 5   |
| 168 | KEGIATAN PEKERJA SENI   | 2   |
| 169 | KEGIATAN PEMROGRAMAN KOMPUTER   | 1   |
| 170 | KEGIATAN PEMUTARAN FILM   | 1   |
| 171 | KEGIATAN PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER   | 1   |
| 172 | KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA  | 7   |
| 173 | KEGIATAN YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN | 16  |
| 174 | KELAB SEPAK BOLA  | 2   |
| 175 | KLU bukan Kelompok (5 digit)  | 1   |
| 176 | KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL  | 4   |
| 177 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL  | 7   |
| 178 | KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA   | 15  |
| 179 | KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN  | 1   |
| 180 | KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN   | 8   |
| 181 | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL  | 13  |
| 182 | KONSTRUKSI JALAN RAYA   | 45  |
| 183 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA                                 | 1   |
| 184 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI   | 1   |
| 185 | KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM   | 22  |
| 186 | KURIR   | 3   |
| 187 | LAPANGAN SEPAK BOLA   | 1   |
| 188 | PANTI PIJAT   | 3   |
| 189 | PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH   | 4   |
| 190 | PEGAWAI NEGERI SIPIL  | 28  |
| 191 | PEGAWAI SWASTA  | 495 |
| 192 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA               | 1   |
| 193 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API             | 1   |
| 194 | PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM  | 2   |
| 195 | PEMBESARAN IKAN LAUT  | 1   |
| 196 | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH  | 1   |
| 197 | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA   | 1   |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 198 | PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH   | 1  |
| 199 | PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU  | 1  |
| 200 | PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM  | 8  |
| 201 | PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT   | 1  |
| 202 | PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT   | 3  |
| 203 | PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM  | 1  |
| 204 | PENCUCIAN DAN SALON MOBIL  | 5  |
| 205 | PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT   | 3  |
| 206 | PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)  | 1  |
| 207 | PENGECATAN   | 1  |
| 208 | PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON   | 1  |
| 209 | PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM   | 1  |
| 210 | PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN   | 1  |
| 211 | PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)   | 28 |
| 212 | PENGUSAHAAN GETAH PINUS  | 1  |
| 213 | PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN  | 42 |
| 214 | PENSIUNAN  | 2  |
| 215 | PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR   | 1  |
| 216 | PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS   | 1  |
| 217 | PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA   | 1  |
| 218 | PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA   | 1  |
| 219 | PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP   | 5  |
| 220 | PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA   | 1  |
| 221 | PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR  | 1  |
| 222 | PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA   | 2  |
| 223 | PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA  | 3  |
| 224 | PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER)  | 16 |
| 225 | PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN  | 4  |
| 226 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA | 1  |
| 227 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR  | 6  |
| 228 | PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK   | 20 |
| 229 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI  | 2  |
| 230 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR   | 2  |
| 231 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN   | 1  |
| 232 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA   | 1  |
| 233 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA  | 7  |
| 234 | PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI  | 2  |
| 235 | PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK   | 6  |
| 236 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL   | 4  |
| 237 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR                                      | 20 |
| 238 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN   | 8  |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 239 | PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN  | 1  |
| 240 | PERDAGANGAN BESAR CAT   | 1  |
| 241 | PERDAGANGAN BESAR FARMASI   | 6  |
| 242 | PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN   | 2  |
| 243 | PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA   | 6  |
| 244 | PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER  | 2  |
| 245 | PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO   | 1  |
| 246 | PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT  | 2  |
| 247 | PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA   | 8  |
| 248 | PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA                                    | 3  |
| 249 | PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA   | 5  |
| 250 | PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU  | 1  |
| 251 | PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS   | 2  |
| 252 | PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL  | 1  |
| 253 | PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA   | 33 |
| 254 | PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN ELEKTRONIK   | 2  |
| 255 | PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG | 8  |
| 256 | PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI   | 1  |
| 257 | PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU  | 1  |
| 258 | PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU   | 5  |
| 259 | PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA  | 2  |
| 260 | PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL   | 1  |
| 261 | PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA  | 2  |
| 262 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA   | 1  |
| 263 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN   | 13 |
| 264 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK   | 3  |
| 265 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA   | 4  |
| 266 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI  | 26 |
| 267 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA                                   | 6  |
| 268 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR  | 41 |
| 269 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN  | 1  |
| 270 | PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)  | 1  |
| 271 | PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK   | 3  |
| 272 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR LAINNYA  | 11 |
| 273 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA  | 8  |
| 274 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA  | 2  |
| 275 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS  | 1  |
| 276 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU   | 8  |
| 277 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN   | 1  |
| 278 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA   | 13 |
| 279 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK   | 6  |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 280 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK   | 31  |
| 281 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA   | 6   |
| 282 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA  | 14  |
| 283 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN  | 1   |
| 284 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM  | 2   |
| 285 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS  | 8   |
| 286 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI  | 6   |
| 287 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT  | 1   |
| 288 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN  | 1   |
| 289 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK   | 1   |
| 290 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN   | 47  |
| 291 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) | 30  |
| 292 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)                                 | 29  |
| 293 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL)                 | 282 |
| 294 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET                                     | 184 |
| 295 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN   | 39  |
| 296 | PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN  | 9   |
| 297 | PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK  | 3   |
| 298 | PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN   | 1   |
| 299 | PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR   | 34  |
| 300 | PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI   | 9   |
| 301 | PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA  | 11  |
| 302 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN  | 3   |
| 303 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN  | 3   |
| 304 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN  | 18  |
| 305 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA  | 1   |
| 306 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN   | 7   |
| 307 | PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS)  | 1   |
| 308 | PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK   | 2   |
| 309 | PERDAGANGAN ECERAN JAM  | 9   |
| 310 | PERDAGANGAN ECERAN KACA   | 1   |
| 311 | PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA  | 5   |
| 312 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK  | 1   |
| 313 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR  | 1   |
| 314 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN  | 3   |
| 315 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK  | 3   |
| 316 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN   | 1   |
| 317 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS  | 2   |
| 318 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL  | 2   |



|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 319 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN  | 3   |
| 320 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS | 1   |
| 321 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA                                     | 2   |
| 322 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL  | 1   |
| 323 | PERDAGANGAN ECERAN KELILING BARANG LAINNYA  | 2   |
| 324 | PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON  | 24  |
| 325 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO   | 7   |
| 326 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL  | 1   |
| 327 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO  | 4   |
| 328 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO   | 3   |
| 329 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO  | 6   |
| 330 | PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA   | 14  |
| 331 | PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK   | 11  |
| 332 | PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727   | 5   |
| 333 | PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA  | 32  |
| 334 | PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA  | 1   |
| 335 | PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI                  | 1   |
| 336 | PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA  | 1   |
| 337 | PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA  | 7   |
| 338 | PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL   | 4   |
| 339 | PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL   | 7   |
| 340 | PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO   | 2   |
| 341 | PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH   | 1   |
| 342 | PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU   | 10  |
| 343 | PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS  | 6   |
| 344 | PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL   | 9   |
| 345 | PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA  | 6   |
| 346 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN  | 109 |
| 347 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS   | 4   |
| 348 | PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN  | 5   |
| 349 | PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK  | 1   |
| 350 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759                                 | 16  |
| 351 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA                            | 54  |
| 352 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA  | 63  |
| 353 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT  | 1   |
| 354 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL   | 18  |
| 355 | PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)   | 6   |
| 356 | PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA   | 4   |
| 357 | PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA   | 18  |
| 358 | PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN  | 7   |

|              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| 359          | PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU                     | 64          |
| 360          | PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA             | 29          |
| 361          | PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU                                | 47          |
| 362          | PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS                               | 3           |
| 363          | PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL                   | 14          |
| 364          | PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA         | 16          |
| 365          | PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM                     | 1           |
| 366          | PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT | 10          |
| 367          | PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA        | 9           |
| 368          | PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL  | 12          |
| 369          | PERGUDANGAN   | 1           |
| 370          | PERIKLANAN  | 4           |
| 371          | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL                            | 1           |
| 372          | PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK LAINNYA           | 1           |
| 373          | PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA                                  | 1           |
| 374          | PERTANIAN TANAMAN HIAS BUKAN TANAMAN BUNGA                          | 2           |
| 375          | PETERNAKAN BABI   | 1           |
| 376          | PONDOK WISATA (HOME STAY)   | 3           |
| 377          | PRAKTIK DOKTER GIGI   | 3           |
| 378          | PRAKTIK DOKTER SPESIALIS  | 3           |
| 379          | PRAKTIK DOKTER UMUM   | 16          |
| 380          | PRODUKSI ES   | 1           |
| 381          | REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK                 | 6           |
| 382          | REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA                        | 9           |
| 383          | REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR                                 | 25          |
| 384          | REPARASI MOBIL  | 22          |
| 385          | REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO                             | 1           |
| 386          | RESTORAN  | 42          |
| 387          | RUMAH MINUM/KAFE  | 5           |
| 388          | RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL  | 1           |
| 389          | SPA (SANTE PAR AQUA)  | 2           |
| 390          | TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL   | 1           |
| 391          | TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL   | 3           |
| 392          | USAHA ARENA PERMAINAN   | 1           |
| 393          | VILA  | 1           |
| 394          | WARUNG INTERNET (WARNET)  | 6           |
| 395          | WARUNG MAKAN  | 79          |
| 396          | WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL)                                      | 1           |
| <b>Total</b> |   | <b>3833</b> |

**2. Tahun 2017**

| NO | JENIS USAHA | JUMLAH WP |
|----|-------------|-----------|
|----|-------------|-----------|

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | ANGGOTA MILITER DAN KEPOLISIAN  | 3  |
| 2  | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS                                       | 2  |
| 3  | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG                                      | 1  |
| 4  | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG                              | 1  |
| 5  | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG                             | 1  |
| 6  | ANGKUTAN PERKOTAAN  | 1  |
| 7  | ANGKUTAN SEWA   | 1  |
| 8  | ANGKUTAN TAKSI  | 1  |
| 9  | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG                  | 1  |
| 10 | BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH  | 1  |
| 11 | BANK PEMERINTAH/BUMN/PERSERO  | 3  |
| 12 | BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR  | 1  |
| 13 | DANA PENSIUN  | 1  |
| 14 | DEKORASI INTERIOR   | 8  |
| 15 | FASILITAS BILLIARD  | 1  |
| 16 | HOTEL BINTANG DUA   | 4  |
| 17 | HOTEL BINTANG LIMA  | 2  |
| 18 | HOTEL BINTANG TIGA  | 2  |
| 19 | HOTEL MELATI  | 14 |
| 20 | INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL  | 6  |
| 21 | INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU                              | 6  |
| 22 | INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA            | 4  |
| 23 | INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL                                     | 1  |
| 24 | INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA                     | 1  |
| 25 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA             | 2  |
| 26 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN                               | 1  |
| 27 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA                                    | 2  |
| 28 | INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI          | 44 |
| 29 | INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET | 1  |
| 30 | INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA                             | 2  |
| 31 | INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU   | 2  |
| 32 | INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR  | 1  |
| 33 | INDUSTRI KECAP  | 1  |
| 34 | INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER                          | 1  |
| 35 | INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA           | 1  |
| 36 | INDUSTRI KUE BASAH  | 2  |
| 37 | INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA                                | 1  |
| 38 | INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan LOGAM                    | 2  |
| 39 | INDUSTRI MINUMAN RINGAN   | 11 |
| 40 | INDUSTRI MINYAK ATSIRI  | 1  |
| 41 | INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI                                      | 1  |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 42 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL   | 6  |
| 43 | INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI   | 1  |
| 44 | INDUSTRI PENCETAKAN UMUM  | 27 |
| 45 | INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN   | 2  |
| 46 | INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL   | 1  |
| 47 | INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL  | 1  |
| 48 | INDUSTRI PERMATA  | 1  |
| 49 | INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA   | 1  |
| 50 | INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA   | 1  |
| 51 | INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE  | 10 |
| 52 | INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA   | 1  |
| 53 | INDUSTRI SIROP  | 1  |
| 54 | INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK  | 1  |
| 55 | INDUSTRI TAHU KEDELAI   | 1  |
| 56 | INDUSTRI TEMPE KEDELAI  | 2  |
| 57 | INDUSTRI TEPUNG TERIGU  | 1  |
| 58 | INDUSTRI WADAH DARI KAYU  | 1  |
| 59 | INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL   | 2  |
| 60 | INSTALASI LISTRIK   | 2  |
| 61 | INSTALASI MEKANIKAL   | 1  |
| 62 | INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA   | 4  |
| 63 | INSTALASI TELEKOMUNIKASI  | 2  |
| 64 | JAMINAN SOSIAL WAJIB  | 1  |
| 65 | JASA AGEN PERJALANAN WISATA   | 21 |
| 66 | JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK   | 1  |
| 67 | JASA ARSITEKUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI  | 16 |
| 68 | JASA BINATU   | 11 |
| 69 | JASA BIRO PERJALANAN WISATA   | 8  |
| 70 | JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)   | 14 |
| 71 | JASA EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)  | 6  |
| 72 | JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)  | 4  |
| 73 | JASA EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)  | 1  |
| 74 | JASA EVENT ORGANIZER  | 8  |
| 75 | JASA FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN JASA KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA  | 7  |
| 76 | JASA FOTOGRAFI  | 24 |
| 77 | JASA HUKUM  | 6  |
| 78 | JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI  | 2  |
| 79 | JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam  | 2  |
| 80 | JASA KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN   | 3  |
| 81 | JASA KEGIATAN SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG | 1  |
| 82 | JASA KEGIATAN SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN   | 3  |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 83  | JASA KEGIATAN SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI LAINNYA  | 1   |
| 84  | JASA KEGIATAN SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI UNTUK JOMPO DAN CACAT  | 1   |
| 85  | JASA KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS   | 1   |
| 86  | JASA MULTIMEDIA LAINNYA  | 3   |
| 87  | JASA PANGKAS RAMBUT  | 4   |
| 88  | JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU  | 1   |
| 89  | JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS   | 3   |
| 90  | JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN   | 3   |
| 91  | JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA  | 2   |
| 92  | JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA   | 7   |
| 93  | JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA  | 3   |
| 94  | JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI   | 1   |
| 95  | JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA   | 1   |
| 96  | JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA   | 6   |
| 97  | JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI  | 1   |
| 98  | JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL   | 1   |
| 99  | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA  | 1   |
| 100 | JASA PENGEPAKAN  | 1   |
| 101 | JASA PENGUJIAN LABORATORIUM  | 1   |
| 102 | JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)   | 12  |
| 103 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA  | 3   |
| 104 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL   | 5   |
| 105 | JASA PENUNJANG HIBURAN   | 3   |
| 106 | JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL  | 2   |
| 107 | JASA PENUNJANG KELISTRIKAN   | 3   |
| 108 | JASA PENYALURAN TENAGA KERJA   | 1   |
| 109 | JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU  | 1   |
| 110 | JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI   | 4   |
| 111 | JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN  | 2   |
| 112 | JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN   | 1   |
| 113 | JASA PERANCANGAN KHUSUS  | 1   |
| 114 | JASA PERANTARA MONETER LAINNYA   | 33  |
| 115 | JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL   | 161 |
| 116 | JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA   | 19  |
| 117 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA   | 4   |
| 118 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH | 2   |
| 119 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI                              | 5   |
| 120 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL                 | 1   |
| 121 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI   | 1   |
| 122 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL                        | 1   |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 123 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL | 1  |
| 124 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA                   | 7  |
| 125 | JASA PERSEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA  | 1  |
| 126 | JASA POLIKLINIK SWASTA  | 2  |
| 127 | JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL  | 1  |
| 128 | JASA REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT   | 3  |
| 129 | JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR                                       | 1  |
| 130 | JASA REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN   | 5  |
| 131 | JASA REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA   | 6  |
| 132 | JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS  | 1  |
| 133 | JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM  | 3  |
| 134 | JASA REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI  | 2  |
| 135 | JASA REPARASI PERALATAN LAINNYA   | 3  |
| 136 | JASA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA   | 3  |
| 137 | JASA REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN                                  | 2  |
| 138 | JASA REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP         | 1  |
| 139 | JASA RUMAH SAKIT SWASTA   | 4  |
| 140 | JASA SALON KECANTIKAN   | 49 |
| 141 | JASA SISTEM KOMUNIKASI  | 2  |
| 142 | KARAOKE   | 3  |
| 143 | KEDAI MAKANAN   | 50 |
| 144 | KEDAI MINUMAN   | 9  |
| 145 | KEGIATAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA   | 1  |
| 146 | KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL  | 2  |
| 147 | KEGIATAN HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA  | 3  |
| 148 | KEGIATAN JASA INFORMASI LAINNYA YTDL  | 2  |
| 149 | KEGIATAN KANTOR PUSAT   | 3  |
| 150 | KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA   | 1  |
| 151 | KEGIATAN ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA  | 7  |
| 152 | KEGIATAN ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL  | 5  |
| 153 | KEGIATAN PEKERJA SENI   | 2  |
| 154 | KEGIATAN PEMROGRAMAN KOMPUTER   | 1  |
| 155 | KEGIATAN PEMUTARAN FILM   | 1  |
| 156 | KEGIATAN PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER   | 1  |
| 157 | KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS  | 1  |
| 158 | KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA  | 5  |
| 159 | KEGIATAN YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN   | 15 |
| 160 | KLU bukan Kelompok (5 digit)  | 1  |
| 161 | KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL  | 4  |
| 162 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL  | 5  |
| 163 | KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA   | 14 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 164 | KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN  | 1   |
| 165 | KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN   | 7   |
| 166 | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL  | 11  |
| 167 | KONSTRUKSI JALAN RAYA   | 43  |
| 168 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA                     | 1   |
| 169 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI   | 1   |
| 170 | KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL  | 1   |
| 171 | KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM   | 24  |
| 172 | KURIR   | 3   |
| 173 | LAPANGAN SEPAK BOLA   | 1   |
| 174 | PANTI PIJAT   | 3   |
| 175 | PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH                             | 2   |
| 176 | PEGAWAI NEGERI SIPIL  | 26  |
| 177 | PEGAWAI SWASTA  | 485 |
| 178 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA   | 1   |
| 179 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG                   | 1   |
| 180 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API | 1   |
| 181 | PEMBESARAN IKAN LAUT  | 1   |
| 182 | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA  | 1   |
| 183 | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI  | 1   |
| 184 | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH  | 1   |
| 185 | PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH  | 1   |
| 186 | PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU   | 1   |
| 187 | PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM                                     | 6   |
| 188 | PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT  | 1   |
| 189 | PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT  | 2   |
| 190 | PENCUCIAN DAN SALON MOBIL   | 4   |
| 191 | PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT  | 3   |
| 192 | PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)   | 1   |
| 193 | PENGECATAN  | 1   |
| 194 | PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN  | 1   |
| 195 | PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)  | 11  |
| 196 | PENGUSAHAAN GETAH PINUS   | 1   |
| 197 | PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN                                       | 23  |
| 198 | PENSIUNAN   | 2   |
| 199 | PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR  | 1   |
| 200 | PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS  | 1   |
| 201 | PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA  | 1   |
| 202 | PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA  | 1   |
| 203 | PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP  | 3   |
| 204 | PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA  | 1   |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 205 | PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA   | 1  |
| 206 | PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA  | 3  |
| 207 | PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER)  | 17 |
| 208 | PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN  | 4  |
| 209 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA | 1  |
| 210 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR  | 7  |
| 211 | PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK   | 21 |
| 212 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI  | 2  |
| 213 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR   | 2  |
| 214 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN   | 1  |
| 215 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA   | 2  |
| 216 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA  | 6  |
| 217 | PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI  | 1  |
| 218 | PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK   | 6  |
| 219 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL   | 4  |
| 220 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR                                      | 20 |
| 221 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN   | 8  |
| 222 | PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN   | 1  |
| 223 | PERDAGANGAN BESAR CAT  | 1  |
| 224 | PERDAGANGAN BESAR FARMASI  | 6  |
| 225 | PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN   | 1  |
| 226 | PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN  | 2  |
| 227 | PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA  | 6  |
| 228 | PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER   | 3  |
| 229 | PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO  | 1  |
| 230 | PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT   | 1  |
| 231 | PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA  | 7  |
| 232 | PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA   | 3  |
| 233 | PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA  | 6  |
| 234 | PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU   | 2  |
| 235 | PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS  | 3  |
| 236 | PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA  | 30 |
| 237 | PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN ELEKTRONIK  | 1  |
| 238 | PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG        | 8  |
| 239 | PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI  | 1  |
| 240 | PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU   | 1  |
| 241 | PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU  | 5  |
| 242 | PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA   | 3  |
| 243 | PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL  | 1  |
| 244 | PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA   | 2  |
| 245 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN  | 11 |



|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 246 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK   | 4   |
| 247 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA   | 4   |
| 248 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI  | 25  |
| 249 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA   | 6   |
| 250 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR  | 37  |
| 251 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN  | 1   |
| 252 | PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)  | 1   |
| 253 | PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK   | 2   |
| 254 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR LAINNYA  | 11  |
| 255 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA  | 9   |
| 256 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA  | 2   |
| 257 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS  | 1   |
| 258 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU   | 7   |
| 259 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN   | 1   |
| 260 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA   | 11  |
| 261 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK   | 6   |
| 262 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK   | 31  |
| 263 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA   | 5   |
| 264 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA  | 13  |
| 265 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM  | 3   |
| 266 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS  | 7   |
| 267 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI  | 5   |
| 268 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT  | 1   |
| 269 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN  | 1   |
| 270 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK   | 1   |
| 271 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN   | 47  |
| 272 | PERDAGANGAN ECERAN BERAS  | 1   |
| 273 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) | 23  |
| 274 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)                                 | 26  |
| 275 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL)                       | 247 |
| 276 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET   | 130 |
| 277 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN   | 41  |
| 278 | PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN  | 5   |
| 279 | PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK  | 4   |
| 280 | PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR   | 34  |
| 281 | PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI   | 6   |
| 282 | PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA  | 10  |
| 283 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN  | 3   |
| 284 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN  | 1   |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 285 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN  | 13 |
| 286 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN   | 3  |
| 287 | PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS)  | 2  |
| 288 | PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK   | 1  |
| 289 | PERDAGANGAN ECERAN JAM  | 8  |
| 290 | PERDAGANGAN ECERAN KACA   | 1  |
| 291 | PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA  | 4  |
| 292 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK  | 1  |
| 293 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR  | 1  |
| 294 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN  | 1  |
| 295 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK  | 4  |
| 296 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS  | 1  |
| 297 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA | 1  |
| 298 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL  | 2  |
| 299 | PERDAGANGAN ECERAN KELILING BARANG LAINNYA  | 2  |
| 300 | PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON  | 22 |
| 301 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO   | 6  |
| 302 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL  | 1  |
| 303 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO  | 6  |
| 304 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO   | 2  |
| 305 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO  | 5  |
| 306 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO   | 1  |
| 307 | PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA   | 14 |
| 308 | PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK   | 10 |
| 309 | PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727   | 2  |
| 310 | PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA  | 20 |
| 311 | PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA  | 2  |
| 312 | PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI  | 2  |
| 313 | PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA  | 7  |
| 314 | PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL   | 3  |
| 315 | PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL   | 8  |
| 316 | PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO   | 2  |
| 317 | PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH   | 1  |
| 318 | PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU   | 10 |
| 319 | PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS  | 8  |
| 320 | PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL   | 8  |
| 321 | PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA  | 5  |
| 322 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN  | 79 |
| 323 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS   | 3  |
| 324 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN   | 1  |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 325 | PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN   | 4  |
| 326 | PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK   | 1  |
| 327 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759      | 13 |
| 328 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA | 57 |
| 329 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA   | 61 |
| 330 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT   | 2  |
| 331 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL                                      | 18 |
| 332 | PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)  | 6  |
| 333 | PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA  | 3  |
| 334 | PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA                            | 21 |
| 335 | PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN   | 1  |
| 336 | PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU  | 59 |
| 337 | PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA  | 29 |
| 338 | PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU   | 45 |
| 339 | PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS  | 3  |
| 340 | PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL  | 13 |
| 341 | PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA                                    | 15 |
| 342 | PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT                            | 4  |
| 343 | PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA                                   | 13 |
| 344 | PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL   | 11 |
| 345 | PERGUDANGAN  | 1  |
| 346 | PERIKLANAN   | 2  |
| 347 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL   | 1  |
| 348 | PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK LAINNYA                                      | 1  |
| 349 | PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA   | 1  |
| 350 | PERTANIAN TANAMAN HIAS BUKAN TANAMAN BUNGA   | 2  |
| 351 | PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINNYA   | 1  |
| 352 | PETERNAKAN BABI  | 1  |
| 353 | PONDOK WISATA (HOME STAY)  | 4  |
| 354 | PRAKTIK DOKTER GIGI  | 4  |
| 355 | PRAKTIK DOKTER SPESIALIS   | 3  |
| 356 | PRAKTIK DOKTER UMUM  | 15 |
| 357 | PRODUKSI ES  | 1  |
| 358 | REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK  | 6  |
| 359 | REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA   | 10 |
| 360 | REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR  | 27 |
| 361 | REPARASI MOBIL   | 23 |
| 362 | RESTORAN   | 47 |
| 363 | RUMAH MINUM/KAFE   | 4  |
| 364 | RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL   | 1  |
| 365 | SPA (SANTE PAR AQUA)   | 2  |

|              |                                |             |
|--------------|--------------------------------|-------------|
| 366          | TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL    | 1           |
| 367          | TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL    | 3           |
| 368          | WARUNG INTERNET (WARNET)       | 2           |
| 369          | WARUNG MAKAN                   | 59          |
| 370          | WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) | 1           |
| <b>Total</b> |                                | <b>3436</b> |

### 3. Tahun 2018

| NO | JENIS USAHA   | JUMLAH WP |
|----|---|-----------|
| 1  | ANGGOTA MILITER DAN KEPOLISIAN  | 2         |
| 2  | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS                                       | 2         |
| 3  | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG                                      | 1         |
| 4  | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG                             | 1         |
| 5  | ANGKUTAN SEWA   | 1         |
| 6  | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG                  | 1         |
| 7  | BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH  | 1         |
| 8  | BANK PEMERINTAH/BUMN/PERSERO  | 3         |
| 9  | BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR  | 1         |
| 10 | DEKORASI INTERIOR   | 7         |
| 11 | FASILITAS BILLIARD  | 1         |
| 12 | HOTEL BINTANG DUA   | 4         |
| 13 | HOTEL BINTANG LIMA  | 2         |
| 14 | HOTEL BINTANG TIGA  | 2         |
| 15 | HOTEL MELATI  | 10        |
| 16 | INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL  | 3         |
| 17 | INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU                              | 4         |
| 18 | INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA            | 4         |
| 19 | INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL                                     | 1         |
| 20 | INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA                     | 1         |
| 21 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA             | 2         |
| 22 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN                               | 1         |
| 23 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA                                    | 1         |
| 24 | INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI          | 40        |
| 25 | INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET | 1         |
| 26 | INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA                             | 2         |
| 27 | INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU   | 1         |
| 28 | INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR  | 1         |
| 29 | INDUSTRI KECAP  | 1         |
| 30 | INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER                          | 1         |
| 31 | INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA           | 1         |
| 32 | INDUSTRI KUE BASAH  | 1         |
| 33 | INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA                                | 1         |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 34 | INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Logam  | 2  |
| 35 | INDUSTRI MINUMAN RINGAN   | 11 |
| 36 | INDUSTRI MINYAK ATSIRI  | 1  |
| 37 | INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI  | 1  |
| 38 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL   | 6  |
| 39 | INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI   | 1  |
| 40 | INDUSTRI PENCETAKAN UMUM  | 21 |
| 41 | INDUSTRI PENGGILINGAN DAN Pembersihan Padi-Padian dan Biji-Bijian   | 2  |
| 42 | INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL   | 1  |
| 43 | INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL  | 1  |
| 44 | INDUSTRI PERMATA  | 1  |
| 45 | INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA   | 1  |
| 46 | INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA   | 1  |
| 47 | INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE  | 10 |
| 48 | INDUSTRI SABUN DAN BAHAN Pembersih Keperluan Rumah Tangga   | 1  |
| 49 | INDUSTRI SIROP  | 1  |
| 50 | INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK  | 1  |
| 51 | INDUSTRI TAHU KEDELAI   | 1  |
| 52 | INDUSTRI TEMPE KEDELAI  | 1  |
| 53 | INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL   | 1  |
| 54 | INSTALASI LISTRIK   | 2  |
| 55 | INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA   | 3  |
| 56 | INSTALASI TELEKOMUNIKASI  | 2  |
| 57 | JAMINAN SOSIAL WAJIB  | 1  |
| 58 | JASA AGEN PERJALANAN WISATA   | 15 |
| 59 | JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK   | 1  |
| 60 | JASA ARSITEKUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI  | 14 |
| 61 | JASA BINATU   | 9  |
| 62 | JASA BIRO PERJALANAN WISATA   | 7  |
| 63 | JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)   | 9  |
| 64 | JASA EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)  | 4  |
| 65 | JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)  | 4  |
| 66 | JASA EVENT ORGANIZER  | 7  |
| 67 | JASA FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN JASA KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA  | 4  |
| 68 | JASA FOTOGRAFI  | 24 |
| 69 | JASA HUKUM  | 5  |
| 70 | JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI  | 2  |
| 71 | JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam  | 1  |
| 72 | JASA KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN   | 3  |
| 73 | JASA KEGIATAN SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG | 1  |
| 74 | JASA KEGIATAN SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN   | 3  |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 75  | JASA KEGIATAN SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI LAINNYA  | 1   |
| 76  | JASA KEGIATAN SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI UNTUK JOMPO DAN CACAT  | 1   |
| 77  | JASA MULTIMEDIA LAINNYA  | 3   |
| 78  | JASA PANGKAS RAMBUT  | 2   |
| 79  | JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU  | 1   |
| 80  | JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS   | 3   |
| 81  | JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN   | 2   |
| 82  | JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA  | 2   |
| 83  | JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA   | 7   |
| 84  | JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA  | 1   |
| 85  | JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI   | 1   |
| 86  | JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA   | 1   |
| 87  | JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA   | 6   |
| 88  | JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL   | 1   |
| 89  | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA  | 1   |
| 90  | JASA PENGEPAKAN  | 1   |
| 91  | JASA PENGUJIAN LABORATORIUM  | 1   |
| 92  | JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)   | 12  |
| 93  | JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA  | 3   |
| 94  | JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL   | 5   |
| 95  | JASA PENUNJANG HIBURAN   | 3   |
| 96  | JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL  | 1   |
| 97  | JASA PENUNJANG KELISTRIKAN   | 2   |
| 98  | JASA PENYALURAN TENAGA KERJA   | 1   |
| 99  | JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU  | 1   |
| 100 | JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI   | 4   |
| 101 | JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN  | 1   |
| 102 | JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN   | 1   |
| 103 | JASA PERANCANGAN KHUSUS  | 1   |
| 104 | JASA PERANTARA MONETER LAINNYA   | 32  |
| 105 | JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL   | 137 |
| 106 | JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA   | 18  |
| 107 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA   | 2   |
| 108 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH | 2   |
| 109 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI                              | 5   |
| 110 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL                 | 1   |
| 111 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL                      | 1   |
| 112 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA  | 5   |
| 113 | JASA PERSEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA   | 1   |
| 114 | JASA POLIKLINIK SWASTA   | 2   |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 115 | JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL  | 1  |
| 116 | JASA REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT   | 3  |
| 117 | JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR                                     | 1  |
| 118 | JASA REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN   | 5  |
| 119 | JASA REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA   | 5  |
| 120 | JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS  | 1  |
| 121 | JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM  | 3  |
| 122 | JASA REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI  | 1  |
| 123 | JASA REPARASI PERALATAN LAINNYA   | 1  |
| 124 | JASA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA   | 3  |
| 125 | JASA REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN                                | 1  |
| 126 | JASA REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP       | 1  |
| 127 | JASA RUMAH SAKIT SWASTA   | 2  |
| 128 | JASA SALON KECANTIKAN   | 40 |
| 129 | JASA SISTEM KOMUNIKASI  | 2  |
| 130 | KARAOKE   | 3  |
| 131 | KEDAI MAKANAN   | 40 |
| 132 | KEDAI MINUMAN   | 8  |
| 133 | KEGIATAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA   | 1  |
| 134 | KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL  | 2  |
| 135 | KEGIATAN HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA  | 2  |
| 136 | KEGIATAN JASA INFORMASI LAINNYA YTDL  | 1  |
| 137 | KEGIATAN KANTOR PUSAT   | 1  |
| 138 | KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA   | 1  |
| 139 | KEGIATAN ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA  | 6  |
| 140 | KEGIATAN ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL  | 4  |
| 141 | KEGIATAN PEKERJA SENI   | 1  |
| 142 | KEGIATAN PEMROGRAMAN KOMPUTER   | 1  |
| 143 | KEGIATAN PEMUTARAN FILM   | 1  |
| 144 | KEGIATAN PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER   | 1  |
| 145 | KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA  | 5  |
| 146 | KEGIATAN YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN | 13 |
| 147 | KLU bukan Kelompok (5 digit)  | 1  |
| 148 | KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL  | 4  |
| 149 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL  | 4  |
| 150 | KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA   | 12 |
| 151 | KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN  | 1  |
| 152 | KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN   | 6  |
| 153 | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL  | 10 |
| 154 | KONSTRUKSI JALAN RAYA   | 40 |
| 155 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA                                 | 1  |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 156 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI  | 1   |
| 157 | KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM  | 20  |
| 158 | KURIR  | 3   |
| 159 | LAPANGAN SEPAK BOLA  | 1   |
| 160 | PANTI PIJAT  | 3   |
| 161 | PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH  | 2   |
| 162 | PEGAWAI NEGERI SIPIL   | 26  |
| 163 | PEGAWAI SWASTA   | 446 |
| 164 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA                                    | 1   |
| 165 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API                                  | 1   |
| 166 | PEMBESARAN IKAN LAUT   | 1   |
| 167 | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA   | 1   |
| 168 | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI   | 1   |
| 169 | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH   | 1   |
| 170 | PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH   | 1   |
| 171 | PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU  | 1   |
| 172 | PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM  | 5   |
| 173 | PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT   | 2   |
| 174 | PENCUCIAN DAN SALON MOBIL  | 4   |
| 175 | PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT   | 3   |
| 176 | PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)  | 1   |
| 177 | PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN   | 1   |
| 178 | PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)   | 8   |
| 179 | PENGUSAHAAN GETAH PINUS  | 1   |
| 180 | PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN  | 18  |
| 181 | PENSIUNAN  | 2   |
| 182 | PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR   | 1   |
| 183 | PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS   | 1   |
| 184 | PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA   | 1   |
| 185 | PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA   | 1   |
| 186 | PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP   | 2   |
| 187 | PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA   | 1   |
| 188 | PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA   | 1   |
| 189 | PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA  | 3   |
| 190 | PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER)  | 16  |
| 191 | PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN  | 4   |
| 192 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA | 1   |
| 193 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR  | 6   |
| 194 | PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK   | 18  |
| 195 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI  | 2   |
| 196 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR   | 2   |



|     |   |    |
|-----|---|----|
| 197 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN  | 1  |
| 198 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA  | 1  |
| 199 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA   | 5  |
| 200 | PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI   | 1  |
| 201 | PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK  | 5  |
| 202 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL                                    | 4  |
| 203 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR                               | 17 |
| 204 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN  | 8  |
| 205 | PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN  | 1  |
| 206 | PERDAGANGAN BESAR CAT   | 1  |
| 207 | PERDAGANGAN BESAR FARMASI   | 6  |
| 208 | PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN  | 1  |
| 209 | PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN   | 1  |
| 210 | PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA   | 6  |
| 211 | PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER  | 3  |
| 212 | PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO   | 1  |
| 213 | PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT  | 1  |
| 214 | PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA   | 5  |
| 215 | PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA                                    | 3  |
| 216 | PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA   | 5  |
| 217 | PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU  | 2  |
| 218 | PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS   | 3  |
| 219 | PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA   | 29 |
| 220 | PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN ELEKTRONIK   | 1  |
| 221 | PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG | 7  |
| 222 | PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI   | 1  |
| 223 | PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU   | 5  |
| 224 | PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA  | 3  |
| 225 | PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL   | 1  |
| 226 | PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA  | 2  |
| 227 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN   | 10 |
| 228 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK   | 3  |
| 229 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA   | 4  |
| 230 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI  | 20 |
| 231 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA                                   | 6  |
| 232 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR  | 31 |
| 233 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN  | 1  |
| 234 | PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)  | 1  |
| 235 | PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK   | 2  |
| 236 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR LAINNYA  | 8  |
| 237 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA  | 9  |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 238 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA  | 2   |
| 239 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS  | 1   |
| 240 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU   | 5   |
| 241 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN   | 1   |
| 242 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA   | 9   |
| 243 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK   | 6   |
| 244 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK   | 29  |
| 245 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA   | 5   |
| 246 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA  | 12  |
| 247 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM  | 3   |
| 248 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS  | 6   |
| 249 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI  | 5   |
| 250 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN  | 1   |
| 251 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK   | 1   |
| 252 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN   | 46  |
| 253 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)         | 20  |
| 254 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)   | 21  |
| 255 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL)                               | 218 |
| 256 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET   | 105 |
| 257 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN   | 37  |
| 258 | PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN  | 5   |
| 259 | PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK  | 3   |
| 260 | PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR   | 31  |
| 261 | PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI   | 5   |
| 262 | PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA  | 10  |
| 263 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN  | 3   |
| 264 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN  | 1   |
| 265 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN  | 9   |
| 266 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN   | 3   |
| 267 | PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS)  | 2   |
| 268 | PERDAGANGAN ECERAN JAM  | 7   |
| 269 | PERDAGANGAN ECERAN KACA   | 1   |
| 270 | PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA  | 4   |
| 271 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK  | 1   |
| 272 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR  | 1   |
| 273 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN  | 1   |
| 274 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK  | 3   |
| 275 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS  | 1   |
| 276 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA | 1   |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 277 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL                             | 2  |
| 278 | PERDAGANGAN ECERAN KELILING BARANG LAINNYA   | 2  |
| 279 | PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON                                   | 21 |
| 280 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO                                    | 6  |
| 281 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL   | 1  |
| 282 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO                       | 6  |
| 283 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO  | 2  |
| 284 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO   | 4  |
| 285 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO  | 1  |
| 286 | PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA  | 12 |
| 287 | PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK  | 9  |
| 288 | PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727                            | 1  |
| 289 | PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA   | 16 |
| 290 | PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA                                     | 2  |
| 291 | PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI | 2  |
| 292 | PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA   | 7  |
| 293 | PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL  | 2  |
| 294 | PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL  | 6  |
| 295 | PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO  | 1  |
| 296 | PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH  | 1  |
| 297 | PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU  | 9  |
| 298 | PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS   | 8  |
| 299 | PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL  | 6  |
| 300 | PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA   | 4  |
| 301 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN   | 73 |
| 302 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS  | 3  |
| 303 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN  | 1  |
| 304 | PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN   | 3  |
| 305 | PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK   | 1  |
| 306 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759                | 13 |
| 307 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA           | 55 |
| 308 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA   | 58 |
| 309 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT   | 2  |
| 310 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL  | 18 |
| 311 | PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)  | 4  |
| 312 | PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA  | 3  |
| 313 | PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA                                      | 16 |
| 314 | PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN   | 1  |
| 315 | PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU  | 56 |
| 316 | PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA  | 27 |

|              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| 317          | PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU                                | 43          |
| 318          | PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS                               | 2           |
| 319          | PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL                   | 12          |
| 320          | PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA         | 15          |
| 321          | PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT | 2           |
| 322          | PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA        | 13          |
| 323          | PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL  | 10          |
| 324          | PERGUDANGAN   | 1           |
| 325          | PERIKLANAN  | 2           |
| 326          | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL                            | 1           |
| 327          | PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK LAINNYA           | 1           |
| 328          | PERTANIAN TANAMAN HIAS BUKAN TANAMAN BUNGA                          | 2           |
| 329          | PONDOK WISATA (HOME STAY)   | 4           |
| 330          | PRAKTIK DOKTER GIGI   | 4           |
| 331          | PRAKTIK DOKTER SPESIALIS  | 3           |
| 332          | PRAKTIK DOKTER UMUM   | 15          |
| 333          | PRODUKSI ES   | 1           |
| 334          | REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK                 | 6           |
| 335          | REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA                        | 9           |
| 336          | REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR                                 | 20          |
| 337          | REPARASI MOBIL  | 23          |
| 338          | RESTORAN  | 43          |
| 339          | RUMAH MINUM/KAFE  | 4           |
| 340          | SPA (SANTE PAR AQUA)  | 2           |
| 341          | TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL   | 1           |
| 342          | TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL   | 2           |
| 343          | WARUNG INTERNET (WARNET)  | 2           |
| 344          | WARUNG MAKAN  | 41          |
| <b>Total</b> |   | <b>3025</b> |

### Lampiran 3

Berikut Data Penerimaan KPP Makassar Barat pada Tahun 2016-2018.

#### 1. Tahun 2016

| Bulan     | Target               | Netto Tahun 2015   | Netto Tahun 2016     | Capai  | Tumbuh |
|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|--------|
| Januari   | 53.135.600.003,00    | 37.526.506.283,00  | 37.786.893.701,00    | 71,11% | 0,69%  |
| Februari  | 104.102.399.998,00   | 70.688.827.038,00  | 70.657.092.023,00    | 67,87% | -0,04% |
| Maret     | 186.516.799.991,00   | 110.702.941.063,00 | 132.289.663.004,00   | 70,93% | 19,50% |
| April     | 285.197.199.995,00   | 152.957.581.258,00 | 195.750.336.733,00   | 68,64% | 27,98% |
| Mei       | 375.202.400.007,00   | 195.828.807.830,00 | 241.673.449.672,00   | 64,41% | 23,41% |
| Juni      | 467.376.400.002,00   | 241.113.377.976,00 | 314.535.267.909,00   | 67,30% | 30,45% |
| Juli      | 557.381.600.014,00   | 303.351.612.287,00 | 358.941.765.617,00   | 64,40% | 18,33% |
| Agustus   | 649.555.600.009,00   | 362.444.078.457,00 | 436.637.716.296,00   | 67,22% | 20,47% |
| September | 742.814.000.024,00   | 426.301.081.085,00 | 738.764.976.521,00   | 99,45% | 73,30% |
| Oktober   | 839.325.600.014,00   | 487.662.286.088,00 | 799.055.897.359,00   | 95,20% | 63,85% |
| November  | 941.259.200.014,00   | 570.792.239.520,00 | 868.385.047.262,00   | 92,26% | 52,14% |
| Desember  | 1.084.400.000.021,00 | 752.151.490.512,00 | 1.019.296.093.390,00 | 94,00% | 35,52% |

#### 2. Tahun 2017

| Bulan     | Target               | Netto Tahun 2016     | Netto Tahun 2017   | Capai   | Tumbuh  |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|---------|---------|
| Januari   | 50.418.273.119,00    | 37.786.893.701,00    | 39.263.274.675,00  | 77,88%  | 3,91%   |
| Februari  | 98.778.657.540,00    | 70.657.092.023,00    | 93.294.979.680,00  | 94,45%  | 32,04%  |
| Maret     | 176.978.428.102,00   | 132.289.663.004,00   | 184.097.273.147,00 | 104,02% | 39,16%  |
| April     | 270.612.363.907,00   | 195.750.336.733,00   | 234.589.165.749,00 | 86,69%  | 19,84%  |
| Mei       | 356.014.744.905,00   | 241.673.449.672,00   | 291.634.000.936,00 | 81,92%  | 20,67%  |
| Juni      | 443.475.014.603,00   | 314.535.267.909,00   | 352.903.739.312,00 | 79,58%  | 12,20%  |
| Juli      | 528.877.395.601,00   | 358.941.765.617,00   | 411.556.217.208,00 | 77,82%  | 14,66%  |
| Agustus   | 616.337.665.299,00   | 436.637.716.296,00   | 481.276.940.076,00 | 78,09%  | 10,22%  |
| September | 704.826.879.351,00   | 738.764.976.521,00   | 547.269.761.065,00 | 77,65%  | -25,92% |
| Oktober   | 796.402.926.461,00   | 799.055.897.359,00   | 624.411.995.446,00 | 78,40%  | -21,86% |
| November  | 893.123.695.310,00   | 868.385.047.262,00   | 709.177.505.942,00 | 79,40%  | -18,33% |
| Desember  | 1.028.944.349.432,00 | 1.019.296.093.390,00 | 854.895.429.241,00 | 83,08%  | -16,13% |

### 3. Tahun 2018

| Bulan     | Target               | Netto Tahun 2017   | Netto Tahun 2018     | Capai   | Tumbuh |
|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|---------|--------|
| Januari   | 52.301.451.000,00    | 39.263.274.675,00  | 62.669.335.100,00    | 119,82% | 59,61% |
| Februari  | 106.832.939.000,00   | 93.294.979.680,00  | 117.824.118.855,00   | 110,29% | 26,29% |
| Maret     | 169.949.145.000,00   | 184.097.273.147,00 | 181.669.538.859,00   | 106,90% | -1,32% |
| April     | 235.437.095.000,00   | 234.589.165.749,00 | 261.834.951.412,00   | 111,21% | 11,61% |
| Mei       | 309.242.367.000,00   | 291.634.000.936,00 | 339.739.006.939,00   | 109,86% | 16,49% |
| Juni      | 387.089.536.000,00   | 352.903.739.312,00 | 405.280.742.854,00   | 104,70% | 14,84% |
| Juli      | 478.520.988.000,00   | 411.556.217.208,00 | 481.748.037.009,00   | 100,67% | 17,06% |
| Agustus   | 587.837.766.000,00   | 481.276.940.076,00 | 554.967.864.851,00   | 94,41%  | 15,31% |
| September | 690.834.069.000,00   | 547.269.761.065,00 | 642.667.248.951,00   | 93,03%  | 17,43% |
| Oktober   | 793.790.766.000,00   | 624.411.995.446,00 | 730.918.011.811,00   | 92,08%  | 17,06% |
| November  | 904.684.970.000,00   | 709.177.505.942,00 | 828.149.127.892,00   | 91,54%  | 16,78% |
| Desember  | 1.086.353.748.000,00 | 854.895.429.241,00 | 1.005.999.927.739,00 | 92,60%  | 17,68% |



## Lampiran 4



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 508/C.4-II/V/40/2019

Makassar, 22 Ramadhan 1440 H

Lamp : -

27 Mei

2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa dibawah ini :

Nama : Karmila Oktafiana

Stambuk : 105751102616

Jurusan : Perpajakan D-III

Judul Penelitian : **Evaluasi Penerapan Perubahan Tarif UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Makassar (Studi Kasus KPP Makassar Barat)**

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

**Ismail Rasulong, SE., MM.**  
NBM-903.078.-

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip

## Lampiran 5



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN UJIP SUMOHARJO KM 4, MAKASSAR 90232  
TELEPON (0411)456132-425225(HUNTING); FAKSIMILE (0411)456131 SITUS: [www.djpb.go.id](http://www.djpb.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;  
EMAIL: [pengaduan@djpb.go.id](mailto:pengaduan@djpb.go.id), [informasi@djpb.go.id](mailto:informasi@djpb.go.id)

### NOTA DINAS

Nomor : ND-~~402~~/WPJ-15/BD-05/2019

Yth : Kepala KPP Pratama Makassar Barat  
Dari : Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Penelitian  
Tanggal : 28 Juni 2019

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 508/C.4-II/VI/40/2019 Tanggal 27 Mei 2019 tentang Pemohonan Izin Penelitian atas nama :

Nama : Karmila Oktafiana  
Stambuk : 105751102616  
Jurusan : Perpajakan D-III  
Judul Penelitian : Evaluasi Penerapan Perubahan Tarif UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Makassar (Studi Kasus KPP Makassar Barat),

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset di KPP Pratama Makassar Barat, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/pelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Soft copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@djpb.go.id](mailto:perpustakaan@djpb.go.id).

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

  
Eko Pandoyo Wisnu Bawono



Lampiran 6



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT**

JALAN BALAI KOTA NO. 15, MAKASSAR 90111  
TELEFON (0411) 3634315, 3634316; FAKSIMILE (0411) 3636066; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200.  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR KET- *ky* /WPJ.15/KP.07/2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sukri Subki  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/IV.b.  
Jabatan : Kepala Kantor  
Unit : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Karmila Oktahana  
NPM : 105751102613  
Program Studi : Perpajakan (DIII)  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Judul Penelitian : Evaluasi Penerepan Perubahan Tarif UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Makassar (Studi Kasus KPP Makassar Barat)

Sesuai dengan Surat Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Nomor 28 Juni 2019 tanggal 28 Juni 2019, telah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat pada tanggal 2-4 Juli 2019.

Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 7 Juli 2019  
Kepala Kantor

Muhammad Sukri Subki

## Lampiran 7

Dokumentasi saat Wawancara dan Observasi selama penelitian.



Dokumentasi pada saat wawancara peneliti kepada Kepala bidang Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Barat



Dokumentasi pada saat wawancara dengan Administrator Bidang Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Maassar Barat



Dokumentasi Peneliti setelah melakukan Wawancara dengan Wajib Pajak UMKM





Dokumentasi aktivitas di KPP Pratama Makassar Barat



Dokumentasi Jenis Usaha Wajib Pajak UMKM yang diwawancarai

## RIWAYAT HIDUP



**KARMILA OKTAFIANA** adalah nama Penulis Karya Tulis Ilmiah ini. Lahir di Kabupaten Kolaka tepatnya di Kelurahan Tosiba Kecamatan Samaturu pada tanggal 6 Agustus 1998. Anak ke lima dari enam bersaudara, anak dari pasangan Muhammad Darwis S.Pd dan Samindang. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di SDN 1 Tosiba pada tahun 2004 dan Tamat pada Tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Samaturu dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat di SMPN, penulis melanjutkan ke SMAN 1 Wolo dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 Penulis melanjutkan Pendidikannya di Perguruan Tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Perpajakan dan menyelesaikan Pendidikannya Pada tahun 2019.

Dokumentasi Tampak Depan Kantor KPP Pratama Makassar Barat